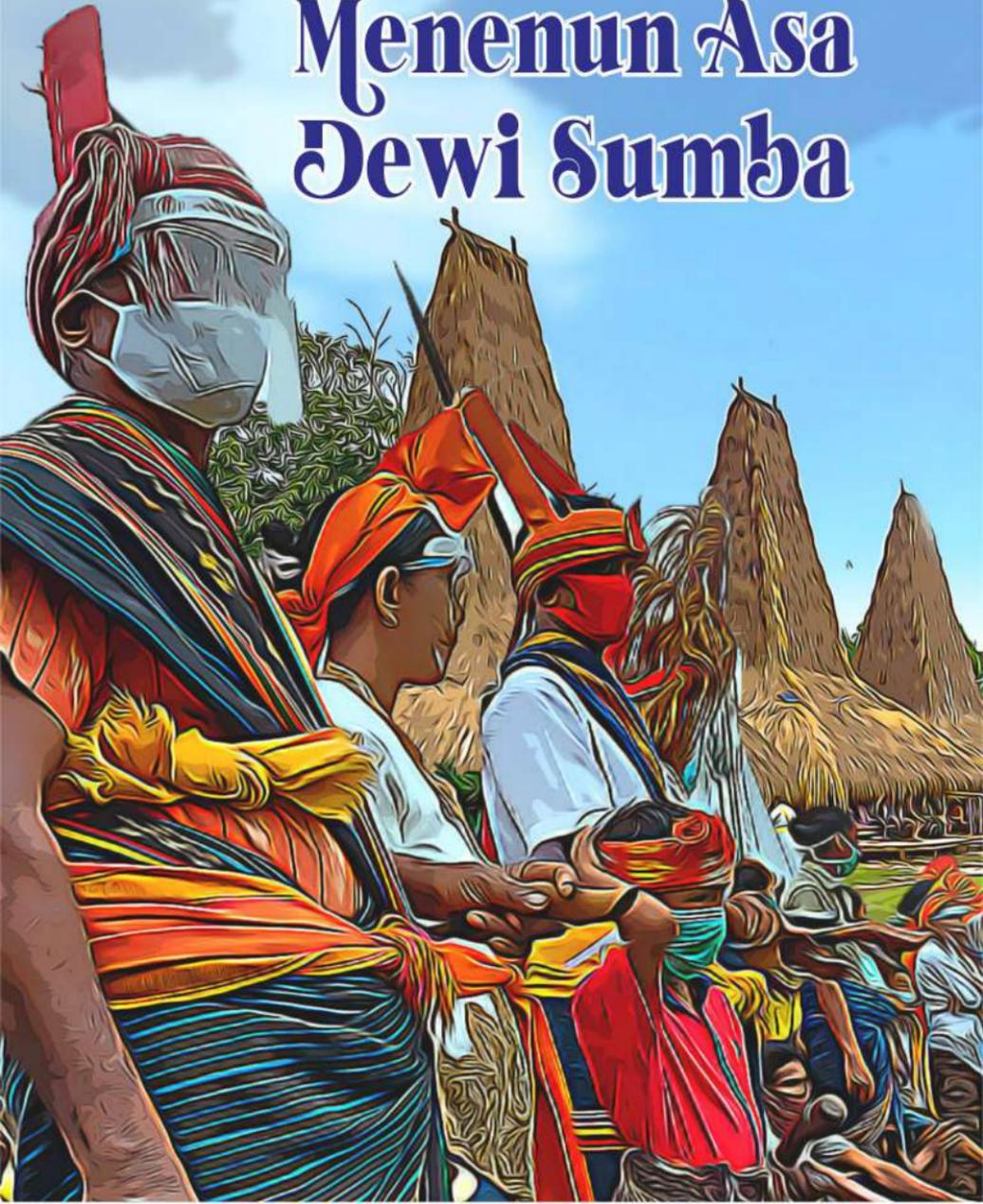




# Menenun Asa Dewi Sumba



# Menenun Asa Dewi Sumba

Pembelajaran Program Pengembangan Desa  
Wisata Berbasis Potensi Alam dan Budaya  
Setempat yang Berkelanjutan



# Menenun Asa Dewi Sumba

Pembelajaran Program Pengembangan Desa  
Wisata Berbasis Potensi Alam dan Budaya  
Setempat yang Berkelanjutan



**MENENUN ASA DEWI SUMBA**

Pembelajaran Program Pengembangan Desa Wisata Berbasis  
Potensi Alam dan Budaya Setempat yang Berkelanjutan

Hak Cipta © *Institute for Research and Empowerment (IRE)* Yogyakarta

Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia  
Oleh Penerbit IRE Yogyakarta, 2021  
dengan dukungan William and Lily Foundation (WLF)

Cetakan Pertama, Maret 2021

**Kata Pengantar:** Dina Marina (Deputi Bidang Penguatan Masyarakat Sipil  
Sektor Sosial Budaya)

**Penulis :** Dr. Bambang Hidayana, Bambang Hendarta S.P.,  
Dinda Ahlul Latifah, Erwin Razak, Ewinda Adlina Hashifa, Gusti Nur Asla Shabia,  
Rajif Dri Angga, Sugeng Yulianto, Sunaryo Hadi Wibowo

**Reviewer:** Dr. Suharko

**Editor:** Fatih Gama Abisono

**Peer Reader:** Dina Mariana, Sukasmanto

**Desain Sampul & Layout:** Suparmo

**Institute for Research and Empowerment (IRE)**

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5

Dusun Tegalrejo RT 01/RW 09

Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta 55581

Phone: 0274 - 867686

E-mail: [office@ireyogya.org](mailto:office@ireyogya.org), Website: [www.ireyogya.org](http://www.ireyogya.org)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Menenun Asa Dewi Sumba, Cetakan. 1

Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2021

xxxviii +106 hlm.; 13 x 20 cm

ISBN: 978-623-91597-7-1

Publikasi ini didanai oleh William and Lily Foundation melalui *Institute for Research and Empowerment* (IRE). Pandangan dan temuan yang terdapat dalam publikasi ini murni berasal dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan William and Lily Foundation maupun mitra pelaksanaannya. Semua pihak tidak bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul, dari, atau, sehubungan dengan materi yang termuat dalam publikasi ini.



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Institute for Research and Empowerment (IRE)* terus berupaya mengambil, mendokumentasikan, dan mempublikasikan pembelajaran-pembelajaran (*lessons learned*) berharga dari setiap program riset dan advokasi yang telah dijalankan. Selain sebagai bentuk akuntabilitas sosial, publikasi atas pembelajaran tersebut diharapkan dapat memperkaya bahan bacaan, sekaligus menginspirasi serta memotivasi berbagai pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian serupa.

Buku *lessons learned* ini menampilkan narasi-narasi perubahan yang telah dicapai dalam program “Memperkuat Desa dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya Setempat” yang didukung oleh William and Lily Foundation (WLF). Kami meyakini sekecil apapun perubahan yang telah ditorehkan, perlu diangkat menjadi sebuah narasi, guna menghargai semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam program tersebut.

Oleh karena itu, kami hendak mengabadikan rasa terima kasih kami kepada; *pertama*, pemerintahan desa dan seluruh warga masyarakat Kampung Adat Ratenggaro (Desa Maliti Bondo Ate) dan Desa Pero Konda, yang telah memberikan kesempatan luar biasa, begitu terbuka dan sangat hangat, serta serius berproses dalam mewujudkan mimpi-mimpi

bersama—membangun pariwisata desa yang lestari sesuai dengan corak dan karakter setempat.

*Kedua*, lembaga WLF yang telah memberikan kesempatan kepada IRE menjalankan program advokasi dan pemberdayaan yang strategis bagi warga dua desa di Sumba Barat Daya (SBD), dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis asset desa yang berkelanjutan dan inklusif. Kami haturkan terima kasih kepada Michele Soeryadjaya, Widya Sutiyo, Dony Purwadi, dan Yulianto Dewata, yang begitu proaktif, responsif, luwes, dan ekstra-toleran dalam mengawal jalannya program. Kepada Ryan Peter dan Herce Horo, tim lapangan di SBD yang selalu cepat dan hangat dalam membantu proses-proses advokasi di lapangan. Juga kepada Setio dan Amanda yang diawal banyak terlibat dalam inisiasi program.

*Ketiga*, Pemerintah Daerah Kabupaten SBD, terutama dr. Kornelius Kodi Mete (Bupati SBD) beserta jajarannya yaitu, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bapalitbangda yang telah memberikan kesempatan bekerja sama sekaligus terlibat dalam siklus aktivitas program. Apresiasi kami sampaikan kepada Ibu Anggie, Pak Christofel Horo, Pak Ludowik, dan Ibu Mitra yang kerap menjadi partner diskusi intens selama siklus program berlangsung.

*Keempat*, Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Sumba Barat Daya (FKP2S) dan tokoh-tokoh masyarakat di SBD, yakni Ibu Dempta Bato, Pak Philipus Renggi, Pak Adi Mada, Pak Donatus Jama Mbohe, Pak Ali Pua Story, dan tokoh-tokoh lokal lainnya yang tidak bisa disebut satu per satu, yang terus berupaya membantu kami tim IRE, intens berdialektika, dan berproses bersama-sama.

*Kelima*, tim program, terutama tim lapangan yaitu Amank, Alex, Darius, Cornel, Arped, Pak Idris, dan Pak Linus, yang terus berupaya mendedikasikan segala kemampuannya demi kelancaran dan kesuksesan program. Pak Steff, konsultan dalam pengadaan infrastruktur di desa *piloting*, yang telah berperan besar dalam proses konsultasi maupun transfer pengetahuan kepada tim pelaksana setempat.

*Keenam*, semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam keberhasilan program, baik sebagai inisiator program, narasumber, pelatih, fasilitator, dan partisipan aktif dalam kegiatan-kegiatan program selama ini.

Akhirnya, kami menghaturkan terima kasih kepada tim peneliti, tim administrasi IRE, serta para penulis buku ini. Semoga buku ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata desa berbasis asset desa, yang dikelola secara inklusif dengan semangat menjaga kelestarian budaya dan ekosistem setempat.

Yogyakarta, 27 Maret 2021

Manajer Program



# KATA PENGANTAR

**Dina Mariana**

Deputi Bidang Penguatan Masyarakat Sipil  
Sektor Sosial Budaya

Desa wisata dalam kurun waktu lima tahun terakhir menjadi ramai diperbincangkan baik oleh kalangan pembuat kebijakan hingga masyarakat biasa. Sektor wisata menjadi sumber penghidupan baru masyarakat desa yang selama ini banyak mengandalkan basis ekonomi sektor primer. Pemerintah Desa juga memandang bahwa menghidupkan pariwisata adalah cara instan meningkatkan Pendapatan Asli Desa cukup dengan melakukan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya wisata di desa telah membuat desa menjadi sumber penghidupan baru, bahkan terjadi *return migration* yang memanggil banyak para pemuda desa yang selama ini menggantungkan hidup di kota akhirnya tertarik kembali ke desa. Desa pun menjadi daya tarik baru wisatawan kota yang ingin kembali merasakan kenaturalan alam pedesaan.

Inilah yang ditangkap oleh Pemerintah sebagai fenomena baru yang perlu mendapat apresiasi dan fasilitasi melalui kebijakan. Walhasil, RPJMN 2020-2024 mulai banyak berfokus pada upaya untuk menghidupkan sektor pariwisata

yang berbasis desa dan komunitas. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah, mulai menyambut kebijakan tersebut dengan regulasi turunan di daerah, memfasilitasi desa menuju terbentuknya desa wisata dan wisata desa. Tidak terkecuali bagi Pemerintah Sumba Barat Daya yang juga menyadari akan besarnya potensi-potensi wisata di desa SBD yang kaya akan potensi alam dan budaya.

Namun hidupnya sektor pariwisata di desa memang tidak dapat hanya dilihat dari aspek manisnya saja, artinya bukan tanpa tantangan, inilah yang penting diantisipasi baik oleh kebijakan lokal maupun dalam membangun tatakelola kelembagaan di tingkat desa. Hadirnya program “Memperkuat Desa dalam Mengembangkan Pariwisata berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya Setempat” yang didukung oleh William and Lily Foundation, berkepentingan untuk mendorong lahirnya kebijakan dan tatakelola pengembangan sektor pariwisata di desa yang berkelanjutan dan inklusif guna menjaga kelestarian alam dan budaya lokal.

Memilih *sustainable tourism* dan *sosial inclusion* sebagai perspektif yang digunakan dalam intervensi program IRE sesungguhnya berangkat dari upaya IRE untuk menjaga kehidupan yang lestari dan sejahtera di desa, terlebih salah satu lokasi program ini berada di Kampung Adat Ratenggaro (KAR) yang memiliki budaya tradisi yang sangat kuat. Buku ini menceritakan bahwa menjadikan kampung adat sebagai destinasi wisata bukan perkara yang mudah, dibutuhkan kehati-hatian agar jangan sampai kehadiran pariwisata justru berkontribusi mencederai adat budaya lokal. Begitu juga dengan upaya mendorong Desa Pero Konda menjadi Desa Wisata dihadapkan pada tantangan keamanan ekonomi

masyarakat pesisir yang sudah mampu bertahan hidup dari hasil tangkapan laut.

Kurun waktu dua tahun memang belum cukup sekedar untuk mempersiapkan desa wisata, karena untuk mempersiapkan desa wisata, justru tantangan pentingnya adalah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembalikan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang ada di desa, menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta mengembangkan ekonomi lokal yang inklusif berbasis aset desa. Dalam buku ini, IRE baru mampu menceritakan tentang pentingnya dukungan dan fasilitasi penting Pemerintah Daerah untuk melahirkan kebijakan yang komprehensif, termasuk yang didukung oleh sektor-sektor pendukung pariwisata. IRE juga baru mulai melakukan penataan kelembagaan pengelola wisata dan BUM Desa sebagai kelembagaan ekonomi yang ada di desa. IRE pun masih terus berproses melakukan pemetaan, penataan, dan pengelolaan potensi-potensi yang dapat mendukung desa wisata. Artinya, pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan masih sangat banyak untuk mewujudkan mimpi bersama ini yang bukan hanya menjadi mimpi IRE saja, melainkan mimpi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Kelompok Pengelola Wisata, BUM Desa dan Masyarakat yang telah merumuskan Visi Perubahan di Desa secara partisipatif.

Kehadiran sektor wisata di desa idealnya mampu menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan, yaitu: adil terhadap kapasitas alam, adil terhadap adat istiadat dan kehidupan sosial masyarakat lokal serta adil terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal di desa.

IRE berharap bahwa buku ini bisa menjadi bacaan yang “renyah” untuk dinikmati oleh semua kalangan yang tertarik untuk mengembangkan desa wisata dan wisata desa, meski kami pun tidak berharap semua desa harus menjadi desa wisata. Pariwisata adalah sumber penghidupan alternatif yang dapat dikembangkan oleh desa, namun tidak harus menghilangkan basis penghidupan utama masyarakat desa. Pandemi COVID-19 cukup menjadi pembelajaran bagi desa-desa yang selama ini justru memilih beralih menjadi desa wisata dan kehilangan basis ekonomi sektor primernya, pada akhirnya harus mengalami guncangan berat karena kebijakan pembatasan sosial yang membuat masyarakat yang hidup di sektor tersier harus kehilangan pekerjaan untuk kurun waktu yang cukup lama. Melalui buku ini, besar harapan kami agar maraknya pembangunan desa wisata saat ini mampu berkontribusi pada terciptanya pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di desa berbasis aset dan potensi lokal.

# DAFTAR SINGKATAN

3T	: Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar
APD	: Alat-alat Pelindung Diri
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bapelitbangda	: Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUM Desa	: Badan Usaha Milik Desa
CBE	: <i>Community Based Enterprise</i>
CBT	: <i>Community Based Tourism</i>
CO	: <i>Community Organizer</i>
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

FKP2S	: Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Sumba Barat Daya
FPO	: <i>Field Project Officer</i>
HPI	: Himpunan Pramuwisata Indonesia
IRE	: <i>Institute for Research and Empowerment</i>
Kades	: Kepala Desa
KAR	: Kampung Adat Ratenggaro
Km	: Kilometer
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MBA	: Maliti Bondo Ate
MCK	: Mandi, Cuci, Kakus
Mdpl	: Meter di Atas Permukaan Laut
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
No.	: Nomor
NTT	: Nusa Tenggara Timur
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OPW	: Organisasi Pengelola Wisata
PAD	: Pendapatan Asli Desa

DAFTAR SINGKATAN

PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDDT	: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemdes	: Pemerintah Desa
Perbup	: Peraturan Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
Perdes	: Peraturan Desa
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PLT	: Pelaksana Tugas
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PO	: <i>Project Officer</i>
Pokdarwis	: Kelompok Sadar Wisata
Polsek	: Kepolisian Sektor
Renja	: Rencana Kerja
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

SBD	: Sumba Barat Daya
SDM	: Sumber Daya Manusia
SHF	: <i>Sumba Hospitality Foundation</i>
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
Sosmed	: Sosial Media
TOC	: <i>Theory of Change</i>
UU	: Undang-Undang
WLF	: William and Lily Foundation

# Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	vii
Kata Pengantar	xi
Daftar Singkatan	xv

<b>Prolog</b>	xxiii
---------------	-------

---

<b>Bab I</b>	<b>Potret Awal Pengelolaan Wisata Sumba Barat Daya</b>	<b>1</b>
--------------	--	----------

---

Prawacana	1
1. Sumba Barat Daya, Magnet Baru Pariwisata Kawasan Timur	3
2. Peta Pengelolaan Wisata di Desa Pilot	12
2.1. Kampung Adat Ratenggaro, Desa Maliti Bondo Ate	13
2.2. Desa Pero Konda	19
3. Problem dan Tantangan Pengembangan Pariwisata di Sumba Barat Daya	21

<b>Bab II</b>	<b>Program Dewi Sumba: Pariwisata Berbasis Aset Lokal</b>	<b>27</b>
---------------	---	-----------

---

Prawacana	27
1. Skema Program	29
2. Intervensi Program	31

2.1. Pendampingan	33
2.2. Asistensi Teknis untuk Advokasi Kebijakan	37
3. Merespon Pandemi Covid-19	41
4. Keberlanjutan Program	41

### **Bab III**    **Geliat Membangun Wisata Desa: Capaian Program Dewi Sumba**

---

Prawacana	45
1. Menata Kebijakan di Level Pemerintah Daerah: dari Hulu hingga Hilir	47
2. Komunikasi Budaya Sebagai Kunci Pelembagaan Wisata Desa	56
3. Sinergi Multipihak: Berbagi Peran untuk Pariwisata Inklusif	70
4. Perubahan Sikap dan Perilaku Sebagai Praktik Sehari-Hari	73

### **Epilog**    **Menarik Pembelajaran Pengembangan Desa Wisata**

---

1. Rambu-Rambu untuk Mengembangkan Desa Wisata	87
2. Membangun Model Pendampingan	96
Daftar Pustaka	99

Daftar Tabel, Bagan, dan Gambar	
Tabel 1.1. Data Kunjungan Wisatawan ke SBD Tahun 2016-2018	9
Bagan 2.1. Kerangka Teori Perubahan ( <i>Theory of Change</i> )	30
Gambar 3.1. Strategi Advokasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata	50
Gambar 3.2. Partisipasi dan Pemberdayaan Desa Wisata	52
Gambar 3.3. Tujuan Pengembangan Desa Wisata	53
Gambar 3.4. Unsur Forum Multi Pihak Pengembangan Pariwisata SBD	72
Gambar 3.5. Peran dan Fungsi Aktor Perubahan dalam Forum Multistakeholders	73
Tabel 4.1. Tabel Tipologi Partisipasi Masyarakat	92





## PROLOG

# MERINTIS BERKEMBANGNYA WISATA BERKELANJUTAN DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA

Oleh: Dr. Bambang Hidayana<sup>1</sup>

### **Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan diawali oleh lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Membumikan dua konsep pembangunan itu merupakan sebuah kewajiban bagi para praktisi pembangunan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan selalu dihubungkan dengan pengembangan ekonomi, tetapi tujuannya bukan sekedar meningkatnya pendapatan per kapita, melainkan harus menjamin terwujudnya

---

<sup>1</sup> Dosen UGM dan Ketua Badan Pengurus Yayasan IRE.

keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Wysokińska, 2017). Konsep pembangunan berkelanjutan dibahas pada KTT Bumi pada tahun 1992 memiliki dua gagasan penting, yaitu mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan kaum miskin serta menyadari keterbatasan sumberdaya alam sehingga harus dikelola secara arif demi kelangsungan kehidupan bersama pada masa mendatang. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (1990) menjelaskan bahwa indikator berjalannya pembangunan berkelanjutan adalah penghematan pemanfaatan sumber daya alam, tidak ada dampak pada kerusakan lingkungan, dan kegiatan pembangunan harus meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (Eticon, 2020). Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan punya perhatian pada pemerataan, pengamanan kelestarian, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan, dan pertahanan kualitas kehidupan manusia.

Para praktisi pembangunan juga telah membangun konsep pariwisata berkelanjutan. Sektor pariwisata ini rawan menimbulkan kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan sosial karena sektor ini paling mudah tumbuh berkembang. Selain itu, masuknya wisatawan ke kawasan objek wisata akan mengganggu kelestarian ekosistem. *World Tourism Organization* menyebutkan bahwa pariwisata berkelanjutan merumuskan setidaknya terdapat 12 tujuan utama (Eticon, 2020). Gagasan *United Nation World Tourism*

*Organization* (WTO) tentang pariwisata berkelanjutan sangat rinci sehingga bisa menjadi acuan yang baik dalam mengawal pembangunan pariwisata di komunitas kecil. Selain rinci, gagasan UNWTO memuat semangat populis, yaitu pembangunan yang berpihak kepada masyarakat bawah dan berbasis pada kekuatan mereka dalam mengelola dan mengembangkan wisata. Dengan demikian, organisasi ini patut menjadi acuan mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia berbasis kepada kekayaan alam, budaya dengan ragam etnik, masyarakat desa, dan adat.

## **Implementasi Pariwisata Berkelanjutan**

Gagasan UNWTO sejalan dengan LSM dan praktisi pemberdayaan masyarakat dalam mempromosikan penguatan ekonomi desa dan masyarakat adat. Gagasan tersebut bisa menjadi acuan bagi mereka dalam mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi yang memberikan harapan besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan adat. Dengan memakai konsep itu, maka sektor pariwisata diarahkan untuk memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi yang terkait seperti pertanian, peternakan, dan penghidupan lain bagi masyarakat lokal. Tidak kalah penting berkembangnya sektor pariwisata akan memperkuat kebudayaan sebagai identitas dan pedoman hidup bermartabat, modal sosial sebagai energi gerakan sosial, dan kearifan lokal yang relevan bagi pelestarian lingkungan hidup.

Implementasi program pengembangan pariwisata berkelanjutan diwujudkan dalam berbagai bentuk usaha pariwisata desa, dengan menggunakan kelembagaan dan

lembaga ekonomi yang bersifat lokal dan partisipatif. Di berbagai daerah, lembaga semacam itu sering disebut dengan nama usaha berbasis pada komunitas (*community-based enterprise*) yang selanjutnya disebut CBE. Beberapa studi menunjukkan peran penting dari CBE, yaitu sebagai usaha ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warganya, dan memberikan penghidupan masyarakat desa ke arah yang lebih berkelanjutan dan memberikan kontrol yang kuat terhadap sumber daya di wilayahnya (Marcinek dan Hunt, 2015; Giampiccoli, 2020; Steiner dan Atterton, 2015). Bisnis lokal itu juga cenderung meningkatkan partisipasi warga dengan menanamkan sahamnya (Valchovska & Watts, 2016).

Di berbagai negara, CBE bergerak di sektor pariwisata sering disebut dengan istilah *community based tourism* (CBT.) Studi-studi di beberapa negara menunjukkan bahwa CBT mampu mengerem masuknya bisnis kapitalis di bidang pariwisata di desa (Giampiccoli, 2020). Beberapa studi di Indonesia juga mengungkapkan bahwa CBT berperan aktif dalam wisata alam dan mampu memberikan kontribusi pada pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup (Pemunta, et. al., 2019). Keunggulan CBT pada kemampuan menjadikan desa atau komunitas dengan segala kekayaan budayanya sebagai objek wisata sehingga dengan aset lokal itu CBT bisa bekerja untuk mewujudkan kesempatan kerja, kesempatan usaha dan kesejahteraan (Simpong, 2019; Mansor, 2019; Hidayana, 2020). Bahkan CBT memiliki komitmen untuk mewujudkan ekonomi moral demi membuka akses bekerja secara merata kepada warga komunitas (Hidayana, 2020).

## **Peran Desa dan Masyarakat Adat dalam Pariwisata Berkelanjutan**

Usaha ekonomi desa merupakan bisnis yang populis baik di Indonesia maupun di China (Suartini dan Permadi, 2019). Di Indonesia, UU Desa No. 6 Tahun 2014 memberi ruang bagi tumbuhnya BUM Desa yang bergerak di bidang desa wisata (Prabowo, 2014). Beberapa studi telah menunjukkan bahwa melalui BUM Desa mampu berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di pedesaan. Sebab BUM Desa menjalankan usaha yang memperkuat akses masyarakat untuk mengelola aset desa, mengembangkan kredit simpan pinjam, pasar dan kesempatan kerja, dan usaha di desa (Arifin, 2020; Dhewanto, et.al, 2020; Sidik, 2020; Samsir, 2016)). Melalui BUM Desa, desa bisa mendayagunakan asetnya dengan menggunakan kekuatan modal sosial, dan mampu membangun wirausaha sosial (Badaruddin, et.al. 2020; Suastika, 2017). Beberapa studi memfokuskan pada BUM Desa yang bergerak di bidang wisata. Hasil studi mengungkapkan bahwa BUM Desa mampu menjawab masalah kelangkaan pekerjaan, usaha, dan penghidupan yang berkelanjutan. Selain itu, BUM Desa bidang wisata bisa secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan (Prabowo, 2014; Purbasari, et. al., 2019).

UU Desa juga memberi pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat, bahkan desa disebut juga nama lain dan nama lain itu sering merujuk kesatuan hukum masyarakat adat. Di luar Jawa, desa adat merupakan institusi yang paling dominan dan terpercaya untuk mengelola pemerintahan lokal dan menjalankan program pembangunan. Sebagian

dari masyarakat adat itu bahkan mampu memiliki CBT seperti Desa Adat Panglipuran di Bali yang berkembang karena menyajikan identitas lokalnya (Murti, 2019).

Dipilihnya sektor pariwisata sebagai kegiatan BUM Desa dan CBT pada masyarakat adat merupakan sebuah agenda yang strategis bagi desa dan masyarakatnya. *Pertama*, sebelum berkembang CBT dan BUM Desa di bidang pariwisata, desa telah menjadi objek bisnis kapitalis di sektor ini. Tetapi desa tidak mendapatkan keuntungan yang setimpal. Kasus munculnya sejumlah objek wisata desa yang dikuasai oleh investor seperti Gua Pindul menjadi contoh yang mengemuka di DIY (Handoko, 2018). Wisata desa yang dikuasai pengusaha artinya wisatawan menikmati pemandangan alam desa, berbagai kearifan lokal, dan atraksi budaya yang dipentaskan orang desa, tetapi mereka tidur, makan, dan membayar berbagai layanan dan atraksi wisata kepada bisnis kapitalis.

*Kedua*, ketika desa semakin dilirik sebagai objek dan destinasi wisata, banyak pengusaha kapitalis mengembangkan bisnis dengan cara berkolaborasi dengan masyarakat desa. Kolaborasi itu bisa mengangkat ekonomi desa, tetapi bisnis pariwisata tetap berada dalam kontrol pengusaha kapitalis daripada warga desa. Sehingga, terjadi pembajakan aset desa, dan lahirlah apa yang disebut sebagai desa wisata semu. *Ketiga*, karena wisata desa berbasis pada aset dan budaya milik desa, maka sudah selayaknya desa mengontrolnya dan menjamin masyarakatnya mendapatkan keuntungan langsung baik yang bersifat material maupun non material.

Perjuangan desa untuk menguasai sektor wisata tidak mudah terwujud sehingga begitu banyak potensi wisata yang

belum dimanfaatkan untuk kemandirian ekonomi desa. Berbagai pengalaman IRE Yogyakarta dalam pendampingan desa membuktikan bahwa untuk membangun BUM Desa saja, desa memerlukan proses panjang dalam membangun kesadaran kritis tentang relevansi lembaga ini bagi peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan warganya. Konflik kepentingan mengenai pendirian BUM Desa antara pemerintahan desa, elit desa, pengusaha, dan warga desa bisa memakan waktu panjang.

Pendirian BUM Desa di bidang pariwisata juga memakan proses yang panjang, terlebih jika diproyeksikan memberikan pendapatan yang besar sehingga menambah konflik kepentingan yang tajam antar berbagai *stakeholder*. Ketika BUM Desa di bidang wisata dapat hidup dan membuahkan pendapatan bagi pendapatan asli desa, maka BUM Desa tersebut tidak serta merta merayakan keberhasilannya. Hal ini karena BUM Desa tersebut masih dihadapkan pada masalah bagaimana berkembang sehingga memberikan penghidupan yang berkelanjutan bagi penduduknya.

Desa-desa yang masih belum berkembang semakin sulit untuk mewujudkan BUM Desa di bidang pariwisata. Diperlukan intervensi melalui advokasi kebijakan dan pendampingan agar desa yang belum berkembang bisa bangkit dan memiliki bisnis di bidang wisata. Namun demikian, selama pelaksanaan UU Desa hampir jarang sekali terdengar munculnya upaya pemerintah daerah memfasilitasi tumbuhnya desa wisata, khususnya di desa-desa yang termasuk sangat tertinggal dan tertinggal. Target pembangunan desa wisata terutama di desa-desa berkembang dan maju. Di beberapa daerah, pembangunan desa wisata juga

bukan memperkuat kemandirian desa, tetapi menjalankan program dari OPD pariwisata yang memfokuskan perhatian pada sektor pariwisata untuk memperkuat perekonomian daerah, dan pemasukan pajak sehingga kurang memberikan responsivitas terhadap penguatan ekonomi masyarakat desa secara langsung.

## **Relevansi Memberdayakan Desa Wisata di Desa Tertinggal**

Transformasi desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi desa berkembang merupakan indikasi keberhasilan pembangunan. Kementerian Desa dan PDTT mencatat jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal mencapai sebanyak 26.551 desa pada tahun 2021. Jumlah ini mencapai sekitar sepertiga dari jumlah desa di Indonesia. Umumnya desa-desa tersebut berada di luar Jawa, khususnya di wilayah NTT dan Papua. Mengembangkan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal menjadi berkembang tidak mudah. Bukan hanya dihadapkan oleh masalah terbatasnya anggaran dan minimnya sarana dan prasarana, tetapi hal itu juga karena desa-desa tersebut termasuk dalam kategori desa terpencil. Mereka dalam posisi terisolir sehingga tidak terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan di daerah. Pembangunan di daerah semacam itu akan memakan dana yang besar. Ditengah minimnya dana dan dukungan politik, maka mereka tidak akan menjadi prioritas dari pembangunan nasional.

Pemberdayaan menjadi solusi realistis bagi masyarakat desa sangat tertinggal dan tertinggal. Sebab pendekatan pemberdayaan bukan menggantungkan pada kekuatan

investasi kapitalis dari luar yang berakibat menggeser aset lokal. Pemberdayaan justru mengandalkan kekuatan ekonomi lokal dan kekuatan sosial-budaya masyarakatnya. Salah satu agenda pemberdayaan yang mampu menggerakkan kekuatan ekonomi, sosial dan budaya lokal adalah desa wisata. Agenda ini bisa dijalankan baik di desa pada umumnya maupun komunitas adat.

Pemerintah Jokowi telah memberikan kepedulian terhadap Daerah 3T yang yang biasanya merupakan daerah dengan desa-desa yang termasuk sangat tertinggal dan tertinggal. Kepedulian itu tidak hanya diwujudkan dengan menjalankan program dana desa, tetapi juga berbagai program yang mampu merubah daerah 3T menjadi latar depan yang membanggakan penduduknya. Pemerintah dan pemda telah memperkenalkan berbagai program *propoor*, *projob*, serta *progrowth* di desa-desa sangat tertinggal dan tertinggal tersebut. Program semacam itu terbukti mujarab pada pengurangan kemiskinan. Namun demikian, desa harus mempunyai penghidupan dan ekonomi unggulan, karena itu perlu berbagai inovasi agar desa-desa tersebut bisa mendulang perubahan dan pemberdayaan.

Salah satu agenda pemberdayaan yang inovatif adalah merintis berkembangnya desa wisata baik di desa konvensional dan desa adat di daerah 3T. Desa wisata mempunyai sisi positif bagi percepatan pembangunan dan menjadi wujud nyata dari pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Pertama*, pariwisata desa merupakan sektor ekonomi yang mendorong uang masuk ke desa guna menikmati sajian wisata yang dikelola oleh warga desa, sehingga memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan. *Kedua*, praktik

eksploitasi kapitalis terhadap sumberdaya desa dapat dicegah karena desa wisata mengandalkan aset milik desa dan masyarakatnya daripada aset dari luar. *Ketiga*, penguatan bisnis, objek, destinasi, lanskap, dan berbagai atraksi wisata akan berimplikasi pada pemberdayaan masyarakat. *Keempat*, menguatnya desa wisata berimplikasi terhadap penguatan sektor-sektor ekonomi terkait, dan berefek pemerataan pendapatan kesejahteraan warga desa.

## **Inovasi Desa Wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya**

William and Lily Foundation (WLF) sebagai organisasi filantropi di Indonesia memberikan kepercayaan kepada IRE Yogyakarta untuk bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya, desa, kampung adat, dan *stakeholders* guna merintis berkembangnya desa wisata sebagai sebuah terobosan untuk memungkinkan desa tertinggal mampu bangkit dengan memanfaatkan sumberdaya manusia, kekuatan sosial ekonomi, serta budaya dan potensi sumber daya alamnya. Terobosan ini bisa dibaca secara tindakan yang pesimistik manakala berangkat dari asumsi bahwa perubahan mewujudkan desa wisata tidak mungkin terjadi ketika masyarakatnya masih tertinggal. Akhirnya yang menikmati pembangunan adalah yang kuat dan sudah mapan.

Donor atau organisasi filantropi, Pemda, dan IRE Yogyakarta mengambil sikap kritis dan menolak ajaran bias kelas menengah tersebut. Program yang dikawal IRE justru disemai di masyarakat desa yang kaya potensi alam, ekonomi, dan budaya tetapi sekaligus kaya masalah. Perubahan akan tersendat karena begitu banyak rintangan psikologis berupa

sulitnya mengubah kebiasaan; rintangan sosial terancamnya struktur yang mapan; dan rintangan budaya berupa benturan nilai-nilai, di samping rintangan ekonomi yang nyata. Rintangan pembangunan tersebut justru menjadi tantangan bagi IRE untuk mengatasinya sehingga mereka yang lemah diproyeksikan bisa bangkit melalui program pemberdayaan di bidang desa wisata. Cara pandang IRE menempatkan rintangan itu harus diubah menjadi kekuatan dan proses perubahan harus dijalankan secara tranformatif dan partisipatif.

Program pemberdayaan wisata dilakukan di dua desa yang berada di wilayah Kecamatan Kodi, yaitu Desa Maliti Bondo Ate dengan wisata Kampung Adat Ratenggaro (KAR) dan Desa Pero Konda dengan potensi wisata pantai. KAR dipilih karena memiliki struktur adat yang kuat dan kekayaan lifeskill dan merepresentasikan budaya dan tradisi Sumba yang unik, dan bisa menjadi daya tarik wisata. Jumlah wisatawan yang masuk ke kampung adat ini juga cukup banyak, yaitu sekitar 8.200 pengunjung pada tahun 2018, sebuah angka yang cukup besar untuk tingkat desa. Hal itu, bisa menjadi pijakan awal dalam mengembangkan wisata adat dan tradisi budayanya. Sementara itu, Desa Pero Konda dipilih karena memiliki pantai indah dan laut nan jernih dan berpotensi untuk pusat kuliner sumber daya laut. Jumlah wisatawan yang masuk ke desa ini pada tahun 2018 mencapai sekitar 5.000 jiwa. Diprediksi, jumlah wisatawan meningkat pesat pasca Pandemi Covid-19.

Program pemberdayaan wisata di dua desa tersebut telah berjalan dua tahun, dan program berhasil membuat inovasi yang mengangkat pariwisata berkelanjutan. Sebelum

program diimplementasikan, dua desa telah lama ditargetkan sebagai desa wisata, tetapi tidak ada agensi dan *governance* yang secara sistematis mendorong proses bergeraknya pemberdayaan. Akibatnya, orang desa dan adat terjebak dalam harapan semu karena mereka tidak memiliki *roadmap*, kelembagaan, pendampingan, dukungan *stakeholder*, dan hanya mengandalkan pada proses yang bersifat alami. Meskipun pemda memiliki komitmen dan program yang nyata, tetapi dukungan pemberdayaan dari lembaga swadaya masyarakat semisal IRE menjadi sangat relevan.

Dua tahun program IRE di dua desa itu berhasil dalam membuahkan peta jalan perubahan yang berkiblat pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. KAR terbawa arus wacana untuk membuat komunitasnya ramah dengan wisatawan serta memberikan akses kepada wisatawan untuk mengapresiasi dan menghayati kehidupan adatnya. Desa adat ini kemudian membekali diri dengan mengorganisasi kegiatan pariwisata sebagai sebuah kegiatan dalam lembaga adat. Langkah pelembagaan wisata adat itu sekaligus dipadukan dengan upaya untuk melestarikan dan mengembangkan berbagai *lifeskill* yang menjadi basis kehidupan masyarakat adat. Sementara Desa Pero Konda melembagakan pariwisata melalui BUM Desa Ana Konda. Dengan lembaga bisnis ini pengembangan wisata pantai berjalan lebih nyata hasilnya. Desa ini melejit menjadi sebuah contoh konkrit bahwa desa tertinggal di Sumba Barat Daya pun bisa bangkit dari ketidakberdayaan ketika mereka membangun desanya berbasis pada potensi pariwisata.

Proses penguatan Kampung Adat Ratenggaro dan Desa Pero

Konda dirintis melalui pengembangan kelembagaan adat dan desa sehingga terbangun tata kelola kelembagaan yang semakin terorganisasi, memiliki visi, misi, dan program yang riil dengan target untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduknya. Pengembangan kelembagaan di komunitas adat dan desa itu menghasilkan agenda-agenda aksi yang secara nyata berusaha untuk merintis berkembangnya tata kelola wisata secara partisipatif dan penguatan peran forum multi *stakeholder* guna memperkuat jejaring dan kerja sama. Tidak ketinggalan, melalui forum multi *stakeholder* program juga mempertemukan antara arus aspirasi dari bawah ke pemda, dan sekaligus mempromosikan program pemda guna disinergikan dengan agenda program pemberdayaan wisata. Tidak kalah penting program berhasil juga dalam memperkuat agenda Pemda dalam menginternalisasikan perbup tentang partisipasi dalam pemberdayaan desa wisata, dan menguatnya trend alokasi anggaran untuk pengembangan wisata di desa. Program itu bisa berhasil dijalankan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Meskipun sejumlah keberhasilan telah diraih, KAR dan Desa Pero Konda perlu membangun renstra jangka menengah dan panjang yang partisipatif dalam mengembangkan wisata. Renstra ini dapat menjadi peta jalan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Tidak kalah penting, penguatan SDM, pelayanan wisata, dan berbagai reproduksi dan pelestarian seni-budaya dan tradisi lokal harus benar-benar sinergis dengan meningkatnya arus wisatawan ke depan. Oleh karena itu, sekalipun masih memerlukan dukungan

LSM, programnya diarahkan untuk menjamin wisata di komunitas adat dan desa dapat mengikis kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi lokal.

# Peta Orientasi Wilayah Program







## BAB I

# POTRET AWAL PENGELOLAAN WISATA SUMBA BARAT DAYA

### **Prawacana**

Pariwisata berkelanjutan menjadi tawaran konsep yang paling relevan dengan konteks pembangunan pariwisata di Sumba Barat Daya. Karakteristik adat yang kuat dan kekayaan alam yang melimpah menjadikan upaya pembangunan pariwisata di daerah ini tidak sekadar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Namun juga berorientasi pada upaya menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat serta daya dukung lingkungan. Mendudukkan perspektif ini menjadi sangat penting dalam rencana pengembangan pariwisata berbasis desa sebagai sektor unggulan di Sumba Barat Daya.

Potensi alam yang melimpah serta adat budaya yang masih terjaga menjadi aset yang potensial untuk dikelola, meski tantangannya masih cukup besar, yaitu soal dukungan kebijakan dan tata kelola pariwisata di tingkat desa. Hadir-

## MARAPU

Orang Sumba menyebut dirinya *Atabara Marapu* yang artinya manusia penyembah Marapu. Sekalipun saat ini mayoritas masyarakat Sumba telah memeluk agama Kristen dan Katholik namun identitas sebagai penganut Marapu masih melekat kuat. Kepercayaan Marapu meyakini selain Tuhan sebagai Sang Pencipta, juga mempercayai adanya alam roh dan arwah leluhur yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam kepercayaan Marapu selalu ada dialog antara manusia yang hidup dengan roh leluhur maupun dunia gaib dalam setiap laku kehidupannya. Setiap suku di Sumba memiliki representasi Marapu yang diyakini sebagai sumber kekuatan. Marapu Ratenggaro, misalnya, direpresentasikan dalam bentuk buaya. Sedangkan pada suku lain ada yang direpresentasikan sebagai kura-kura, burung elang, dan lain sebagainya. Marapu selain identik dengan kekuatan magis, juga bersinggungan dengan pengobatan.

Adat Marapu mengajarkan manusia wajib menjaga kesucian hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia, termasuk

nya IRE melalui Program “Memperkuat Desa dalam Mengembangkan Pariwisata berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya Setempat” harapannya dapat berkontribusi dalam mendorong tatakelola pariwisata di desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berangkat dari perspektif itu pula, pendekatan *theory of change* menjadi pilihan digunakan dalam proses pendampingan sebagai agenda utama program ini, yaitu pendekatan yang mengedepankan partisipasi dan adaptasi agar tidak berbenturan dengan nilai tradisi lokal.

Program IRE di Kabupaten Sumba Barat Daya, khususnya di Desa Pero Konda dan Desa Maliti Bondo Ate diawali dengan melakukan *baseline study* yang bertujuan untuk

mendapatkan potret awal tentang pengelolaan wisata dan gambaran kehidupan masyarakat desa. Studi inilah yang menjadi referensi bagi pengelola program dalam menyusun visi perubahan dan agenda intervensi program. Bab ini akan terlebih dulu menampilkan tentang kondisi awal sebelum adanya intervensi baik di tingkat kabupaten maupun desa.

## 1. Sumba Barat Daya, Magnet Baru Pariwisata Kawasan Timur

Sumba, gugus pulau yang terletak di propinsi NTT, akhir-akhir ini menjadi buah bibir setelah keelokan hamparan sabana serta keunikan budayanya tampil di film layar lebar “Marlina the Murderer in Four Act” dan “Susah Sinyal”. Nama Sumba semakin melambung di mata pariwisata internasional saat Hotel Nihiwatu Resort dinobatkan sebagai resort terbaik di dunia tahun 2016 lalu oleh majalah wisata *Travel+Leisure*. Bahkan beberapa pesohor dunia telah menikmati eksotisme pulau yang juga dikenal memiliki ras kuda poni sandel (*sandalwood pony*) ini.

Pulau berjuluk negeri seribu bukit ini menyimpan daya tarik wisata yang begitu kaya. Kekayaan tersebut berupa adat budaya marapu, rumah adat *uma kalada* dengan kekhasan menara atap yang menjulang, kubur batu peninggalan jaman megalitikhum, dan tentu saja bentang sabana maupun pantai-pantai yang menawarkan eksotisme. Kombinasi eksotisme alam dan keunikan budaya yang otentik inilah sebagai

harmoni alam semesta, agar senantiasa penuh berkah. Ritus Marapu tidak hanya hadir dalam peristiwa besar kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian saja. Ritus Marapu juga dihayati dalam kehidupan keseharian antara lain dalam bercocok tanam, membangun rumah, memindahkan benda di dalam kampung adat, bahkan memastikan seseorang berniat baik atau buruk dan penyelesaian konflik antar warga. Rato atau pemimpin adat menjadi mediator dalam ritual tersebut. Rato menempati posisi tertinggi dalam relasi sosial suku-suku di Sumba. Peran rato sebagai imam yang memediasi hubungan antara roh leluhur dengan orang-orang yang hidup.

Prosesi ritual Marapu selalu bersifat komunal dan dilengkapi dengan persembahan, bahkan seringkali dengan menumpahkan darah hewan ternak besar atau kecil, bergantung pada tujuan dan makna yang dikehendaki. Marapu bukan saja bermakna spiritual namun juga ikatan

modal utama pulau ini menjadi destinasi wisata baru, selain destinasi wisata utama seperti Bali, Lombok, dan Labuhan Bajo.

Asal-usul masyarakat Sumba sendiri berasal dari campuran ragam ras yakni Melanesia, Melayu, Austronesia, Mongoloid, dan Kaukasoid. Jejak kehidupan di wilayah *Umalulu* menjadi petunjuk awal kehidupan mengenai awal mula peradaban suku bangsa Sumba yang ditengarai telah ada sejak masa jaman Neolitik (Sularto, 1980). Peradaban tersebut terus berkembang hingga masa Megalitik yang ditandai dengan kubur batu besar berpola dolmen. Hingga saat ini, peninggalan kubur batu dapat dijumpai di hampir seluruh pelosok perkampungan Sumba. Kubur batu dengan pola dolmen menjadi ciri khas budaya Sumba, selain tenun, kuda sandel, dan rumah adat *uma kalada*.

Secara administratif, Sumba terdiri dari empat kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Dua kabupaten terakhir merupakan wilayah pemekaran dari Sumba Barat yang dikukuhkan melalui UU No. 16 Tahun 2007. Akses masuk Pulau Sumba via udara dapat ditempuh melalui Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Timur. Bahkan saat ini SBD dinilai memiliki posisi yang strategis di masa mendatang, karena memiliki bandara dengan kapasitas dan infrastruktur yang paling baik di Sumba. Kabupaten ini juga memiliki penduduk terbanyak di Sumba, dengan potensi kekayaan budaya serta keindahan pantai dan perbukitan yang sangat menawan.

Pertumbuhan pariwisata di Sumba dalam beberapa tahun terakhir ini, tentu tidak lepas dari kebijakan sektor pariwisata

dalam promosi dan pengembangan sepuluh destinasi baru oleh pemerintah pusat pada tahun 2017. Selain itu prioritas pembangunan kawasan timur Indonesia dalam berbagai aspek turut memberikan dampak positif bagi dinamika pariwisata di Sumba. Beberapa destinasi wisata di Sumba berkembang cukup signifikan sebagai dampak mulai terbukanya akses dan terbangunnya fasilitas infrastruktur menuju sejumlah obyek wisata.

Sebagai salah satu sektor terkemuka, pariwisata menjadi andalan sumbangan devisa yang signifikan bagi Indonesia. Kinerja sektor pariwisata setiap tahun berkecenderungan terus meningkat. Tercatat, jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 11,52 juta orang dengan penerimaan devisa mencapai 176,23 triliun rupiah pada tahun 2016 lalu. Jumlah tersebut meningkat tahun 2017, dengan wisatawan asing mencapai angka 14,04 juta orang dengan sumbangan devisa sebanyak 202,13 triliun rupiah. Angka tersebut terus meningkat pada tahun 2018 dengan pendapatan devisa mencapai 224 triliun rupiah dari kunjungan wisatawan manca sebanyak 15,81 juta orang (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2018).

### **Sumba Barat Daya, Magnet Baru Pariwisata Kawasan Timur**

Kabupaten SBD memiliki batas wilayah Samudera Hindia di sebelah barat dan selatan dan Selat Sumba di sebelah Utara. Batas wilayah daratan hanya di sisi timur yang berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat. Dengan luas daratan mencapai 1.445,32 Km<sup>2</sup>, sebagian besar wilayah Kabupaten SBD berupa perbukitan dengan variasi kemiringan 140-400

mdpl. Kabupaten SBD terdiri dari 11 wilayah kecamatan dengan kecamatan terluas berada di Kodi Utara yaitu sekitar 243,82 Km<sup>2</sup>. Bentang alam perbukitan lebih banyak ditemui di wilayah Wewewa. SBD memiliki sekitar 175 desa dengan jumlah desa terbanyak ada di Kecamatan Kodi Utara (BPS, 2020). Ibu kota Kabupaten SBD terletak di Tambolaka.



Peta Kabupaten Sumba Barat Daya

Hingga tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten SBD tercatat sebanyak 338.427 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk pada tahun 2016-2017 sebesar 1,9%. Sedangkan pada tahun 2017- 2018 meningkat menjadi 1,97%. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018, komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di SBD menunjukkan kelompok umur 0 –4 tahun memiliki jumlah paling banyak (51.972 jiwa), sedangkan umur 75 tahun ke atas paling sedikit (3.282 jiwa). Angka tersebut menggambarkan angka kelahiran cukup tinggi di SBD namun angka harapan hidup justru relatif rendah. Data BPS

pada tahun yang sama mencatat bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 173.594 jiwa lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan sebanyak 164.833 jiwa. Angka melek huruf penduduk SBD pada tahun 2018 mencapai 86,60% dari keseluruhan penduduk berusia 15 tahun ke atas (BPS, 2019).

Potensi Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten SBD cukup besar. Setidaknya terdapat tiga karakteristik pariwisata yang dapat dikembangkan yaitu wisata alam pantai dan perbukitan, wisata adat budaya, serta wisata sejarah. Kabupaten ini juga memiliki 14 obyek wisata utama yang menjadi unggulan sebagaimana dirilis oleh Dinas Pariwisata Kabupaten SBD dalam peta wisata "*Southwest Sumba The Miraculous Land*" pada tahun 2019 lalu. Peta wisata tersebut memuat empat kampung adat, yaitu Uumbu Koba, Wee Lewo, Ratenggaro, dan Wainyapu. Kampung adat yang terakhir disebutkan tersebut merupakan kampung adat terbesar di SBD dengan kurang lebih 60 unit rumah adat *uma kalada* dan lebih dari seribu kubur batu jaman megalithikum.

Sedangkan wisata alamnya berupa pantai dengan pasir dan batu karang yang indah, hamparan sabana, dan salah satu favorit bagi wisatawan adalah Danau Weekuri di Kodi Utara. Selain itu masih banyak destinasi wisata belum sepenuhnya tereksplorasi namun telah mendatangkan kunjungan wisatawan. Meskipun akses menuju ke lokasi wisata masih relatif sulit, sejumlah wisatawan rela bersusah payah menempuh perjalanan tersebut. Hal itu menunjukkan, wisata alam SBD memiliki daya tarik sangat kuat sehingga mampu memaksa wisatawan datang meskipun dengan fasilitas serba terbatas.

Kekayaan adat budaya dan sejarah sebagai warisan yang terjaga hingga kini juga merupakan potensi dan aset yang otentik bagi SBD. Komunitas adat Marapu, kampung adat dengan rumah adat *uma kalada* dan kubur batu, serta berbagai produk budaya yang berbentuk benda (*tangible*) lainnya dan tak benda (*intangible*) menjadi pesona magis bagi wisatawan, terutama turis manca negara. *Uma* atau *umma* adalah sebutan rumah khas Sumba yang berupa rumah panggung berbentuk segi empat yang berbahan dasar kayu dan bambu. Atapnya menggunakan alang-alang kering dengan atap yang tinggi menjulang. Bagian bawah rumah biasanya untuk memelihara hewan ternak. *Uma* sudah semakin berkurang jumlahnya karena berbagai faktor, namun rata-rata disebabkan oleh bencana atau rusak termakan usia. Butuh biaya yang sangat besar dan waktu yang cukup lama untuk membangun sebuah *uma* di dalam kampung adat.

Salah satu aktivitas adat Marapu yang memiliki daya tarik adalah ritual Pasola, karena hanya ada di Sumba Barat Daya dan Sumba Barat. Pasola rutin diselenggarakan setiap tahun pada bulan Februari - Maret di wilayah desa yang memiliki kampung adat paling “tua” yang mewakili suku besar. Atraksi Pasola yang menarik perhatian wisatawan adalah keseruan adu keahlian berkuda sembari melempar lembing berbahan rotan. Selain Pasola, aktivitas budaya yang menarik bagi wisatawan adalah ritual tarik batu kubur yang dapat ditemui di seluruh kecamatan di SBD, upacara penyucian diri yang disebut *wula poddu* di Kecamatan Kodi dan Kecamatan Wewewa Selatan, serta ritual *teda* yakni permohonan berkat atas tanaman di Kecamatan Kodi Bangedo.

Kuatnya pesona alam dan budaya berbanding lurus

dengan peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke SBD dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal itu terekam dengan baik dari catatan BPS yang menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.1. Peran media sosial yang diunggah oleh wisatawan menjadi salah satu faktor menentukan dalam menarik minat kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di SBD.

**Tabel 1.1. Data Kunjungan Wisatawan ke SBD Tahun 2016-2018**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata	4.687	5.466	8.214
Jumlah Kunjungan Wisata direncanakan	4.850	5.335	5.868
Rata – rata lama kunjungan (hari)	1,8	2	2
Persentase	96,64	102,46	139,98

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019

Potensi sektor pariwisata yang berkembang pesat tersebut sesungguhnya juga menjadi peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat SBD. Namun peningkatan potensi tersebut berbanding terbalik dengan gambaran kesejahteraan warga SBD. Sumba termasuk salah satu wilayah yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi secara nasional maupun regional wilayah Propinsi NTT. Pada tahun 2018, penduduk SBD yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 97.280 jiwa atau 28,88%. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan penduduk miskin provinsi NTT yakni sebesar 1.140.000 jiwa atau 21,35% dan angka

## PASOLA

Upacara Pasola yang lebih dikenal sebagai atraksi adu keahlian berkuda sembari melempar lembing rotan. Pasola merupakan warisan tradisi adat Marapu yang sangat menarik minat bagi warga lokal dan wisatawan. Rangkaian adat Pasola biasanya diselenggarakan antara bulan Februari hingga Maret di wilayah Wanukaka, Lamboya, Gaura, dan Kodi yang melibatkan puluhan kampung adat dari kabihu atau suku besar yang ada di wilayah tersebut.

Pasola memiliki sejumlah upacara adat yang dipimpin oleh para Rato/pemuka adat untuk memohon restu kepada Tuhan dan arwah leluhur agar diberikan hasil panen yang melimpah. Rangkaian Pasola diawali oleh sidang para Rato untuk menentukan waktu pelaksanaan "Nyale" berdasarkan perhitungan kemunculan bulan. Rato melakukan doa-doa dan berpuasa sebagai proses pembersihan diri agar segala hal perbuatan jahat yang ada dapat hilang dari

penduduk miskin secara nasional yaitu 25.670.000 jiwa atau 9,66% (Bapelitbangda SBD, 2020). Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I relatif tinggi sebesar 84,13% dari keseluruhan kategori aspek kesejahteraan masyarakat di SBD (Bapelitbangda SBD, 2020). Demikian pula dengan PDRB per kapita masyarakat SBD sebesar Rp 10,29 juta, yang sangat timpang jika dibandingkan dengan PDB per kapita Indonesia di tahun 2019 sebesar Rp 59,1 juta per tahun. (Bapelitbangda SBD, 2020).

Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke

SBD juga tak sebanding dengan kontribusi terhadap PDRB yang diterima dari sektor pariwisata yakni sebesar 0,04%. Penerimaan daerah dari sektor pariwisata berupa retribusi obyek wisata baru dilakukan pada tahun 2018. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilakukan pemungutan retribusi di sektor pariwisata. Kunjungan wisata juga belum optimal sepenuhnya yakni hanya sebesar 8.214

orang dengan lama kunjungan rata-rata selama 2 hari pada tahun 2018, padahal potensi wisata SBD sangat kaya. Hal ini menunjukkan minimnya kinerja kebijakan pemerintah daerah setempat dalam mengembangkan peluang berupa potensi pariwisata di SBD. Oleh karena itu, pertumbuhan kunjungan wisatawan di Kabupaten SBD harus segera direspon oleh pemerintah daerah dan masyarakat SBD agar potensi dan aset wisata yang dimiliki dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal untuk kesejahteraan warga.

kehidupan warga. Tradisi “Bau Nyale” dilakukan oleh Rato yang memanggil nyale atau cacing laut yang dimitoskan hanya keluar setiap satu tahun sekali. Warga akan menangkap nyale untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga. Perkiraan hasil panen diyakini tergambar dari sejumlah warna cacing laut yang keluar, semakin banyak nyale yang keluar dengan warna tertentu maka diprediksi panen akan melimpah.

Tradisi pasola hingga saat ini tetap lestari, karena dalam Marapu, pengabdian dan ketaatan pada leluhur adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Pasola juga menyiratkan simbol proses penyelesaian konflik melalui mediasi adu kekuatan secara fair sehingga dalam permainan pasola tidak boleh ada dendam sekalipun seringkali ada emosi dan darah yang tertumpah. Pasola saat ini menjadi ikon pariwisata di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, yang tidak ada di kabupaten lainnya di Pulau Sumba.

NB: disarikan dari dokumen Desa dan informan di Pero Konda.

BOX  
1.2

## 2. Peta Pengelolaan Wisata di Desa Pilot

Pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten SBD, memberikan peluang dan harapan dalam memperbaiki kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pengelolaan potensi dan aset tersebut memiliki tantangan dan menyimpan kerentanan di masa mendatang jika tidak dikelola dengan arif. Hasil *assessment*

*Institute for Research and Empowerment* (IRE) Yogyakarta dengan dukungan William and Lily Foundation (WLF) menemukan bahwa aset-aset yang ada saat ini sebagian besar telah dikuasai dan bahkan dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan dari luar Pulau Sumba. Pemerintah Daerah SBD ternyata kalah sigap dengan sektor swasta yang bergerak di jasa pendukung pariwisata, seperti perhotelan, *tour and travel agent*, restoran, dan jasa rental kendaraan. Desa dan masyarakat yang berada di destinasi wisata pun belum menyadari arus perkembangan wisata yang sedang bergerak kedirinya (IRE, 2018).

Bulan September 2018, IRE melakukan assesmen tentang "Kapasitas Kesiapan Desa untuk Mempromosikan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat Daya", yaitu di Kampung Adat Ratenggaro (KAR) yang terletak di Desa Maliti Bondo Ate (MBA), Desa Pero Konda, dan Desa Kadi Roma. Assesmen ini untuk melihat dan menganalisis sejauh mana kesiapan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta warga lokal desa dalam merespon arus besar wisatawan melalui pengelolaan potensi dan aset yang dimilikinya. Assesmen tersebut juga memetakan isu strategis, kebutuhan, serta tantangan yang ada di level kabupaten dan desa, termasuk tingkat komunitas/warga. Berdasarkan hasil assesmen tersebut, IRE menetapkan dua lokasi yang dipilih sebagai pilot program pelebagaan wisata desa yaitu Desa Maliti Bondo Ate di mana Kampung Adat Ratenggaro berada dan Desa Pero Konda.

## 2.2. Kampung Adat Ratenggaro, Desa Maliti Bondo Ate

Kampung Adat Ratenggaro (KAR) berjarak sekitar 56 km dari Tambolaka dengan waktu tempuh sekitar 90 menit berkendara menggunakan mobil atau motor sehingga Ratenggaro tergolong destinasi wisata yang mudah dikunjungi. Rate Nggaro, demikian penulisan yang tepat menurut tokoh adat setempat, merupakan satu dari sepuluh kampung adat yang berada di wilayah administratif Desa Maliti Bondo Ate (MBA), Kecamatan Kodi Bangedo. Rate yang artinya kuburan dan Nggaro artinya suku atau kampung. Salah satu tokoh adat setempat yang terkemuka Donatus Jama Bohe menuturkan, konon pada jaman dahulu, pendirian kampung ini dengan mengorbankan sepasang suami istri, Nggaro dan Mamba, yang dipenggal kepalanya untuk persembahan. Kuburan sang suami, Nggaro, di kubur di dalam kampung agar menjadi pelindung dalam kampung. Sedangkan kuburan istrinya, Mamba, dikubur di batas tebing agar menjadi pelindung di setiap sudut kampung. Donatus Jama Bohe adalah salah satu tokoh adat dari *uma kataku natara*, rumah induk yang selama ini menjadi kediaman keturunan *ama* yang dipercaya sebagai keluarga besar pemimpin di Ratenggaro.



Kubur Mamba dan Nggaro yang terletak dalam Kampung Adat Ratenggaro

Desa Maliti Bondo Ate merupakan desa pemekaran dari Desa Umbu Ngedo pada tahun 2017. Wilayah Desa Maliti Bondo Ate memanjang dari timur ke barat sekitar 8,6 km dan dari selatan ke utara sekitar 4,5 kilometer. Wilayahnya terbagi ke dalam tiga dusun dan kampung adat. Di masing-masing dusun terdapat beberapa kampung adat dengan paling banyak berada di Dusun I. Setidaknya terdapat tujuh kampung adat yang letaknya tidak terlalu berjauhan. Mayoritas warga Desa MBA adalah petani kebun dan ladang, dan hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai nelayan, wiraswasta, guru, dan PNS. Kegiatan bertani dan berladang lazim dilakukan pada musim penghujan, dengan menanam padi jenis gogo dan jagung. Sedangkan pada musim kemarau aktivitas warga selain menanam jagung lebih banyak menjemur pandan untuk anyam tikar, membuat ukir-ukiran, atau mencabut alang untuk dijual sebagai bahan atap rumah khas Sumba.

## Daya Tarik, Potensi, dan Tantangan

Kampung Adat Ratenggaro menjadi salah satu destinasi favorit di Kabupaten Sumba Barat Daya karena memiliki situs batu kubur purba warisan dari jaman megalitikum, sekitar 2.500 tahun Sebelum Masehi. Situs tersebut berada di tengah kampung dikelilingi sekitar 16 rumah adat *uma kalada* dengan ciri khas atap menjulang belasan meter menantang langit. Keyakinan Marapu menjadi pelengkap nuansa kehidupan warga Ratenggaro. Daya tarik kampung adat ini bukan hanya dari cara mereka berpakaian dan beraktivitas sehari-hari, namun juga cerita sejarah kampung, ritual adat, dan warisan tradisi lisan berupa *folklore* yang unik di Ratenggaro. Kekayaan budaya lain yang dimiliki oleh Ratenggaro adalah kemampuan membuat kain tenun, kerajinan parang, patung kayu, serta berbagai cinderamata ukiran dari kayu, tanduk, dan tulang. Aktivitas menari dan memainkan alunan musik khas Kodi juga merupakan potensi yang dimiliki oleh warga KAR.

Selain nuansa mistis dan magis di dalam kampung adat, panorama alam di Ratenggaro menyuguhkan panorama demikian elok. Samudera Hindia dan muara Sungai Waila berpadu membentuk delta berpasir putih menjadi sajian mempesona. Pada salah satu sudut muara di pantai tersebut terdapat tiga kubur batu kuno yang masih berdiri kokoh. Apabila berdiri di tebing yang berada di sisi selatan kampung maka wisatawan dapat memandangi lepas ke arah Delta Sungai Waila dan Pantai Ratenggaro.



Panorama pertemuan muara Sungai Waila dan Pantai Ratenggaro

Dengan daya tarik semacam itu, KAR berhasil menemukan keunikan dan mendorong popularitasnya. Tak mengherankan kunjungan wisatawan yang datang ke Ratenggaro terus meningkat. Dari buku tamu yang dimiliki kampung tersebut, pada tahun 2017, tamu tercatat 8.200-an orang yang terdiri dari 5.000 orang wisatawan domestik dan 3.200 wisatawan asing. Sedangkan hanya dalam kurun waktu Juni-Agustus 2018, tercatat jumlah tamu yang singgah telah mencapai 3000-an pengunjung. Melihat rentang tiga bulan tersebut (Juni – Agustus), KAR telah mendatangkan kunjungan sebesar itu, menjadi sinyal kuat tentang prospek kunjungan wisatawan di Ratenggaro di waktu-waktu mendatang (IRE, 2018).

Namun sejauh ini wisatawan yang berkunjung ke Ratenggaro hanya melakukan aktivitas yang monoton, yaitu melihat dan berfoto di kampung, kubur batu, dan pantai. Interaksi

intensif antara warga dengan wisatawan sangat minim, selain hanya menawarkan kain tenun atau cinderamata. Hal ini menjadi tantangan bagi para pelaku wisata untuk mengeksplorasi lebih lanjut atraksi menarik bagi wisatawan.



Kerajinan buah tangan warga Kampung Adat Ratenggaro

Aktivitas wisata juga memberi dampak sosial bagi warga Ratenggaro. Dampak tersebut, dapat pula dimaknai sebagai dampak negatif wisata. Persoalan etika dan perilaku wisatawan, seperti cara berpakaian wisatawan misalnya, menjadi perbincangan serius diantara warga Ratenggaro. Sebagian warga dapat menerima dan memaklumi perbedaan kebiasaan tersebut namun ada pula yang menganggapnya tidak sopan karena berada di dalam area kampung yang dikeramatkan. Dampak lain adalah perubahan mentalitas anak-anak Ratenggaro dan orang dewasa terhadap

wisatawan. Banyak anak-anak Ratenggaro yang sehari-hari tidak bermukim di kampung, tetapi pada waktu puncak kunjungan (*peak season*), anak-anak tersebut beramai-ramai beraktivitas di Ratenggaro. Anak-anak ini “memperlihatkan diri” di kampung dengan harapan memperoleh simpati berupa uluran uang, pakaian, atau buku pensil dari para wisatawan. Padahal, nilai yang digenggam erat masyarakat Ratenggaro, pantang meminta uang pada wisatawan (IRE. 2018). Belum lagi, keberadaan buku tamu yang kerap memicu perselisihan antarwarga terkait pengelolaan kunjungan. Perselisihan tersebut menyiratkan adanya persaingan antarwarga dalam berebut rejeki dari kehadiran aktivitas wisata.

Persoalan berikutnya adalah minimnya fasilitas pendukung wisata di Ratenggaro. Fasilitas dasar seperti papan informasi, toilet, air bersih, listrik, serta posko keamanan pantai belum tersedia secara memadai. Fasilitas toilet berasal dari bantuan Dinas Pariwisata setempat sebenarnya telah tersedia, namun kondisinya sudah tidak layak digunakan. Dari sisi lingkungan, ancaman berupa abrasi air laut di muara pantai dan tebing di sisi selatan kampung Ratenggaro juga belum menjadi perhatian serius. Peran pemerintah desa dalam urusan pemberdayaan kampung-kampung adat agar dapat mengelola aset dan potensi dalam konteks wisata desa sejauh ini belum terlihat.

Temuan assesmen tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata belum dikelola dengan baik dan beresiko memicu terjadinya masalah sosial. Masalah ini bila tidak diatasi dan dikelola dengan baik tentu saja dapat melahirkan kerentanan. Padahal, arus kedatangan pengunjung ke Ratenggaro sulit dibendung. Pada saat yang sama wisatawan membutuhkan

kenyamanan layanan saat mereka berwisata. Hal tersebut menunjukkan antara *supply and demand* tidak berada dalam satu titik temu yang seimbang. Kelemahan yang menonjol di Ratenggaro sebagai tujuan utama wisatawan ke SBD adalah absennya pengelola wisata yang terorganisir. Sumber daya manusia pun menjadi salah satu tantangan yang cukup besar. Hasil laporan assesmen WLF yang ditulis oleh Sandjaja & IRE (2018:14) secara spesifik menggarisbawahi bahwa tantangan pengembangan pariwisata KAR adalah kesediaan warga muda dan dewasa untuk meningkatkan kapasitasnya berkaitan dengan kepariwisataan.

## 2.2. Desa Pero Konda

Desa Pero Konda secara definitif ditetapkan sebagai desa pemekaran dari Desa Pero Batang pada tahun 2013. Luas wilayah Desa Pero Konda sekitar 4.360 hektar, yang terdiri dari tanah ladang seluas 2.439 hektar, tanah pemukiman 1.862 hektar, serta hutan bakau seluas 59 hektar. Secara administratif Desa Pero Konda berada di Kecamatan Kodi, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Berbeda dengan mayoritas penduduk di Sumba Barat Daya yang beragama Nasrani, warga Pero Konda hampir seluruhnya beragama Islam.

Merujuk pada dokumen RPJM Desa Pero Konda tahun 2017-2023, warga Pero Konda sangat meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari Ende. Arti kata Pero Konda berasal dari Bahasa Ende, yaitu Pero yang berarti Burung Nuri dan “Ana Konda” yang artinya Juragan Perahu atau Nahkoda. Apabila diartikan lebih luas lagi, Pero Konda mengandung makna seorang nahkoda “yang datang dari

tempat yang jauh”, yaitu dari Ende Flores. Hasil laut dari Pero Konda memenuhi kebutuhan bahan makanan laut di SBD dan Sumba Barat. Beberapa jenis ikan, gurita, kerang, dan cumi yang memiliki kualitas baik bahkan diperdagangkan ke luar Sumba.

### **Daya Tarik, Potensi, dan Tantangan**

Potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Pero Konda berupa pantai yang menghadap langsung Samudera Hindia. Sunset bernuansa jingga yang memayungi samudra, ditingkahi ombak laut berkejaran dan membentur karang di pantai yang pada akhirnya membentuk “air mancur” unik menjadi sensasi tersendiri. Pada sebagian kawasan pantai di sisi barat laut terdapat hamparan karang berlumut yang menyisakan air laut sedalam mata kaki saat muka air surut. Selain itu terdapat sebuah teluk yang dihubungkan oleh daratan berpasir putih. Pada teluk ini akan tampak kapal-kapal nelayan yang berjajar rapi. Wisatawan dapat menikmati aktivitas nelayan di bibir pantai ataupun ketika kapal-kapal nelayan berangkat melaut saat siang jelang sore hari.

Pantai Pero pernah menjadi pintu masuk wisatawan asing ke Pulau Sumba. Saat itu terdapat kapal pesiar yang secara berkala singgah di perairan Pantai Pero. Ketika kapal pesiar membuang sauh di kawasan Pantai Pero, *travel agent* menyewa sejumlah kapal nelayan untuk mengangkut turis dari kapal pesiar ke pantai. Saat melakukan kunjungan ke wilayah Kodi, biasanya wisatawan menjadikan Pantai Pero sebagai tujuan akhir berwisata untuk menikmati *sunset* sebelum mereka kembali ke Tambolaka. Namun sayangnya, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten tidak memiliki data resmi untuk

melihat jumlah wisatawan yang mengunjungi pantai Pero setiap bulan atau tahunnya.

Hasil tangkapan laut oleh nelayan Pero Konda menjadi salah satu daya tarik wisata di desa ini. Cumi merupakan hasil laut yang menjadi produk andalan nelayan Pero Konda. Saat musim cumi, satu kapal nelayan Pero Konda dapat membawa pulang hasil melaut sekurangnya 100 kilogram cumi. Selain cumi, tangkapan nelayan Pero cukup beragam seperti gurita, cakalang, lobster, karapu, sarden, dan oras. Namun sayangnya tidak ada data tentang jumlah hasil tangkapan laut oleh nelayan dalam sehari atau sebulan.

Tantangan bagi Desa Pero Konda dalam mengembangkan pengelolaan wisata desa antara lain, *pertama*, pemerintahan desa dan warga desa belum menyadari bahwa aset dan potensi yang mereka miliki dapat dikelola untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan kesejahteraan warga. *Kedua*, pengetahuan dan pemahaman tentang pengembangan ekonomi lokal dengan mendayagunakan aset dan potensi melalui aktivitas wisata desa masih sangat minim. *Ketiga*, kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Pero Konda untuk mampu mengembangkan dan mengelola potensi dan aset yang dengan optimal dan berkelanjutan belum muncul.

### **3. Problem dan Tantangan Pengembangan Pariwisata di Sumba Barat Daya**

Sektor pariwisata di SBD sesungguhnya menyimpan kerentanan sekalipun jumlah wisatawan dan destinasi wisata yang terekplorasi dari waktu ke waktu terus meningkat setiap tahunnya. Hasil assesmen (WLF, 2018) mengungkapkan

sedikitnya terdapat empat problem dan tantangan pengembangan sektor pariwisata di SBD yakni; *pertama*, minimnya ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata. Jumlah layanan akomodasi di SBD masih terbatas. Data BPS tahun 2018 menyebutkan hanya tersedia 12 hotel/penginapan yang hanya berada di Tambolaka, sedangkan jumlah restoran yang tersedia terdapat 26 buah. Selain di ibukota kabupaten tidak mudah untuk menemukan tempat makan yang memadai, rata-rata wisatawan harus membawa bekal makan siang dari Tambolaka untuk berwisata di sejumlah destinasi wisata. Fasilitas transportasi umum juga masih sangat minim. Jumlah kendaraan umum yang beroperasi di dalam kota maupun luar kota sangat terbatas. Sehingga wisatawan hanya memiliki opsi untuk menyewa mobil atau motor untuk mobilitas yang lebih cepat dan nyaman. Selain itu ketersediaan air bersih dan fasilitas MCK di sejumlah destinasi wisata hampir tidak ada.

*Kedua*, terbatasnya fasilitas infrastruktur. Kondisi jalan aspal yang cukup baik hanya tersedia pada jalur-jalur utama, misalnya dari pusat Kota Tambolaka menuju ibukota kecamatan dan jalur antar kabupaten. Akses jalan menuju sejumlah destinasi wisata di SBD sebagian besar masih berupa jalan pengerasan berupa pemadatan batu dan kerikil, bahkan masih berupa jalan tanah. Akses jaringan listrik di pedesaan masih sangat minim. Bahkan sering terjadi pemadaman listrik yang dalam sehari bisa saja terjadi lebih dari tiga kali. Beberapa hotel dan penginapan tidak semuanya memiliki genset, sehingga ketika listrik padam saat malam hari mau tidak mau wisatawan akan menikmati suasana gelap gulita di dalam kamar.

*Ketiga*, minimnya pengelolaan destinasi wisata. Daya tarik wisata alam dan budaya SBD yang sangat kuat belum diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Hingga tahun 2018 hanya ada satu destinasi wisata yang telah tertata dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, yaitu Danau Weekuri. Beberapa destinasi wisata di SBD justru dikelola secara pribadi oleh perseorangan ataupun pihak swasta, seperti pantai Mandorak dan pantai Oro. Selebihnya tidak ada pengelolaan resmi dari warga lokal, pemeritah desa maupun pemeritah daerah sehingga seringkali memunculkan pungutan liar dari sekelompok orang pada wisatawan yang berkunjung. Fenomena tersebut kerap menimbulkan kerawanan dari segi keamanan dan kenyamanan pengunjung.

*Keempat*, lowongnya kebijakan sektor pariwisata yang terpadu. Kebijakan dan regulasi di sektor pariwisata merupakan bagian penting untuk menghadirkan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan pariwisata di suatu daerah. Apalagi ketika memasuki iklim kompetisi pariwisata antar daerah yang begitu ketat. Hasil assesmen WLF (2018), menyatakan Kabupaten SBD sejauh ini belum memiliki kebijakan yang komprehensif di sektor pariwisata. Selain itu dukungan program dan anggaran dari OPD/SKPD di luar Dinas Pariwisata yang terkait dengan pengembangan sektor pariwisata masih sangat terbatas. Dampaknya adalah desa dan komunitas warga di tingkat lokal tidak memiliki panduan dan dukungan pengetahuan yang memadai dalam mengembangkan inisiatif mengelola aset dan potensi yang dimilikinya.

Selanjutnya, dari gambaran umum kepariwisataan di kabupaten SBD, termasuk di Kampung Adat Ratenggaro

dan Desa Pero Konda dapat dirumuskan lima isu strategis yaitu: *Pertama*, potensi kekayaan alam, budaya adat istiadat, dan modal sosial yang dimiliki belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa maupun komunitas warga. *Kedua*, minimnya ketersediaan sumber daya manusia di tingkat lokal yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan mengembangkan dan mengelola wisata desa secara memadai. *Ketiga*, masih rendahnya komitmen dan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat untuk mengambil peluang pengembangan ekonomi lokal, terutama di sektor pariwisata. *Keempat*, ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana pariwisata masih sangat minim yang pemenuhannya membutuhkan peran serta multi pihak terutama pemerintah daerah. *Kelima*, Belum adanya kebijakan dan regulasi operasional oleh pemerintah kabupaten dan desa yang menyediakan daya dukung bagi pengembangan wisata berbasis komunitas di tingkat lokal. Kelima isu strategis di atas sangat krusial untuk didiskusikan guna mencari solusi yang disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan baik di level kabupaten maupun desa. Apalagi hampir seluruh destinasi wisata di SBD berada di wilayah desa dengan kondisi relatif serupa sebagaimana gambaran yang terjadi di Ratenggaro maupun Pero Konda.

### **3. Dewi Sumba, Sebuah Tawaran Programatik**

Menjawab tantangan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten SBD itu, IRE Yogyakarta dengan dukungan WLF menginisiasi Program “*Memperkuat Desa dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya Setempat*”. Program ini selanjutnya disebut secara singkat sebagai “Dewi Sumba” atau Desa Wisata Sumba Barat Daya. Program Dewi Sumba merupakan ikhtiar untuk memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah yang dialamatkan pada kelima isu strategis tersebut.

Program ini diorientasikan untuk mendorong pemerintah daerah, desa, dan komunitas lokal agar memiliki kesiapan dan mampu memperkuat kapasitasnya dalam pengembangan wisata melalui optimalisasi potensi dan aset yang dimilikinya. Kapasitas bagi upaya untuk membangun kesadaran dan komitmen Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa serta masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan wisata di tingkat lokal. Tujuan akhir dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mampu menjaga dan mempertahankan kekayaan alam serta budaya adat istiadat yang selama ini dimilikinya untuk kehidupan yang berkelanjutan (*sustainability livelihood*). Pola pendekatan, desain, dan alur program, beserta aktivitasnya akan diuraikan pada bab selanjutnya.





## BAB II

# PROGRAM DEWI SUMBA: PARIWISATA BERBASIS ASET LOKAL

### Prawacana

Pariwisata desa berkembang pesat dalam tujuh tahun terakhir. Perkembangan tersebut dikaitkan dengan kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membuka kesempatan bagi Desa untuk bertumbuh dan mandiri. Berbekal kewenangan begitu besar, Desa dapat memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Desa dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya sosial-budayanya yang dikombinasikan dengan kapasitas masyarakat serta infrastruktur pendukung yang tersedia (Saragih dkk, 2007). Kombinasi sejumlah aset tersebut jika dijalankan dengan tata kelola yang baik, dapat menghadirkan perubahan signifikan terutama untuk kemakmuran masyarakat.

Secara faktual, tidak semua desa memiliki kapasitas memadai dalam mengelola aset-aset produktifnya bagi perbaikan kemakmuran. Jamak terjadi, desa-desa tersebut menghadapi tantangan berupa kesiapan warga yang kerap dikaitkan dengan problem struktural berupa absennya *enabling environment* yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa warga desa. Dampaknya, desa-desa yang berlimpah sumberdaya alam dan kaya aset sosial-budaya, acap kali belum mampu mendayagunakan aset-aset potensial tersebut secara bijak. Berbagai aset yang tersedia belum banyak berkontribusi dalam meningkatkan kemakmuran warga masyarakatnya (IRE, 2017). Gambaran serupa juga ditemukan di Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur. Daerah tersebut memiliki sumberdaya alam yang begitu elok serta kehidupan budaya begitu unik, yang mengundang kekaguman banyak orang dari luar Sumba. Namun demikian, daerah belum bisa memanfaatkan potensi luar biasa tersebut secara optimal.

Berangkat dari gambaran kondisional tersebut, bab ini akan memaparkan Program Dewi Sumba yang diinisiasi IRE Yogyakarta dengan dukungan WLF sebagai tawaran programatik dalam memberikan kontribusi solutif atas tantangan tersebut. Secara resmi program bertajuk “Memperkuat Desa dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Sumberaya Alam dan Budaya Setempat” ini memilih dua desa di Kabupaten SBD sebagai desa pilot, yaitu Desa Maliti Bondo Ate dan Desa Pero Konda. Program ini menjalankan misi memfasilitasi dua desa tersebut agar dapat mendayagunakan potensi asetnya secara lebih baik dan produktif secara berkelanjutan.

## 1. Skema Program

Proyek advokasi kebijakan dan pemberdayaan warga lokal dengan dukungan WLF ini, dialamatkan untuk menjawab dua problem utama, yakni: *Pertama*, di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) belum terdapat desa wisata, sehingga belum memiliki rujukan desa wisata sesuai dengan konteks desa-desa di wilayah tersebut. Padahal di beberapa desa di Kabupaten SBD telah membuka kunjungan wisata dan menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini bermakna, desa-desa di Kabupaten SBD menyimpan potensi wisata begitu besar namun belum didayagunakan secara optimal. *Kedua*, pada sejumlah desa yang telah membuka kunjungan bagi wisatawan belum tampak memiliki kesiapan dalam mengelola wisata desa. Orientasi dan kapasitas para pemangku kepentingan di desa masih lemah dalam hal pemahaman terhadap UU Desa, BUM Desa, dan model bisnis wisata desa. Oleh karena itu, intervensi melalui proyek ini berupaya untuk menghasilkan, setidaknya dua perubahan mendasar, yaitu: *pertama*, terbentuknya manajemen wisata desa yang efektif dalam membangun kolaborasi para pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekosistem desa wisata; dan *kedua*, dua desa pilot dapat mengembangkan ekonomi lokal melalui wisata desa berbasis aset yang ada (IRE, 2018).

Program ini juga dirancang dengan dua fase utama yang ditempuh guna mewujudkan misi proyek yaitu: *pertama*, persiapan. Fase ini merupakan tahap untuk memenuhi berbagai prasyarat yang diperlukan untuk melaksanakan program. Situasi ketidaksiapan para pihak membutuhkan proses penguatan kapasitas pengelolaan dalam melakukan pendampingan. *Kedua*, pelaksanaan yang berorientasi

sampai pada proses pelebagaan dengan mendorong pembentukan kebijakan daerah maupun pada level desa untuk mempromosikan pariwisata berbasis kekayaan desa dan lokalitas yang ada.

Dalam kerangka itulah, proyek ini memilih kerangka kerja dengan pendekatan teori perubahan (*Theory of Change Frame Work*). Desain kerangka kerja teori perubahan dalam program ini, dilakukan dengan membangun visi perubahan kolektif di antara para pelakunya, yang dicapai melalui perubahan-perubahan bertahap serta menysar pada area-area perubahan strategis yang telah menjadi kesepakatan bersama.

### 2.1. Bagan Kerangka Teori Perubahan (*Theory of Change*)



Sumber: Dokumen Usulan Program Dewi Sumba, IRE (2018).

Proyek didesain untuk mendorong dua kelompok sasaran berhasil mengembangkan desa wisata dengan mengintervensi empat area strategis sekaligus. *Pertama*, pemerintah daerah. Area ini penting diintervensi untuk menciptakan ekosistem kondusif bagi wisata desa. Melalui kebijakan dan dukungan program, diharapkan pemerintah

daerah dapat menghadirkan lingkungan kebijakan yang dapat menumbuhkan prakarsa dan kapasitas desa dalam mengembangkan wisata desa. Sasaran utama area ini adalah Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta DPRD. *Kedua*, desa. Intervensi area strategis ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas Desa dalam merespon perubahan karena adanya wisata desa. Pada area ini menyoar pemerintahan desa (pemerintah desa dan BPD) dan aras masyarakat desa (pelaku wisata desa, perempuan, pemuda, warga miskin, dan warga *difable*).

*Ketiga*, pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten SBD. Intervensi pada area ini ditujukan untuk membangun kapasitas kolaboratif dunia usaha di sektor pariwisata. Pelaku pada area strategis ini hendak didorong agar berkomitmen kuat dalam bersinergi dengan mitra pemerintah daerah maupun desa yang mengembangkan wisata desa. *Keempat*, organisasi pengelola wisata desa. Area starategis ini diletakkan sebagai “*intermediary agency*” yang akan disasar perubahannya agar mampu menghubungkan kehendak otoritas kebijakan, baik Pemerintah Daerah dan Desa serta pemangku kepentingan pariwisata menuju pada pencapaian visi perubahan yang ditetapkan.

## 2. Intervensi Program

Konsekuensi dari memilih pendekatan *theory of change* artinya akan ada adaptasi-adaptasi yang dilakukan dalam pengelolaan program ini mengingat terbukanya ruang partisipasi dan menguatkan kepemilikan warga desa atau komunitas terhadap program ini. Dibutuhkan toleransi antara perencanaan dengan pelaksanaan program (AECF,

2004). Namun demikian program ini juga merancang dan melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mendukung pencapaian visi perubahan di tiap desa.

Intervensi utama yang dilakukan dalam program ini meliputi kegiatan pendampingan desa/kelompok dan advokasi kebijakan. Akan tetapi, rangkaian proyek ini dimulai dengan melakukan studi awal (*baseline study*) terlebih dahulu untuk memotret kondisi desa dan dilanjutkan dengan lokakarya visi perubahan dan di akhir proyek dilakukan kegiatan studi akhir (*endline study*).



Diskusi Kelompok pada Kegiatan Perumusan Visi Perubahan di Desa Pero Konda

Lokakarya visi perubahan melibatkan perwakilan dari unsur masyarakat yang secara bersama-sama merumuskan visi perubahan kolektif yang hendak diwujudkan. Di Desa Pero Konda, kegiatan ini melibatkan perwakilan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga-lembaga yang ada di desa, tokoh masyarakat, dan warga biasa. Sedikit berbeda dengan Desa Pero Konda, penyelenggaraan kegiatan

di KAR, kegiatan ini melibatkan seluruh warga masyarakat yang tinggal di KAR, ditambah perwakilan Pemerintah Desa Maliti Bondo Ate, BPD, Lembaga Adat KAR, dan LPM desa setempat. Kegiatan yang digelar selama dua hari pada Mei 2019 ini juga bersifat terbuka. Peserta berasal dari ragam kalangan baik dari generasi muda, para sepuh, laki-laki, perempuan, warga miskin, dan bahkan juga melibatkan perwakilan dari warga.

Kegiatan di dua desa pilot tersebut, tidak hanya menghasilkan rumusan visi perubahan. Mereka juga merumuskan rute yang memuat tahapan-tahapan yang akan ditempuh mencapai impian tersebut; serta pemetaan pemangku kepentingan lainnya yang pada masa mendatang akan berkontribusi dalam mewujudkan impian bersama tersebut. Ringkasnya, kegiatan ini berhasil membentuk rumusan visi perubahan secara utuh beserta operasionalisasinya di kedua desa pilot tersebut.

## 2.1. Pendampingan

Proyek ini diperkuat pula dengan skema pendampingan selama kurang lebih 1,5 tahun di dua level sekaligus—desa dan supra-desa. Pendampingan ditempuh dengan cara memberikan penguatan kapasitas yang diperlukan serta menemani mereka para pemangku kepentingan berproses dalam mengupayakan perubahan. Fase ini mensyaratkan daya tahan ekstra, terutama bagi tim proyek yang terjun langsung *day-by-day* di lapangan, seperti *Project Officer (PO)*, *Field Project Officer (FPO)*, dan *Community Organizer (CO)*. Selain menghadapi dinamika sosial dan politik lokal baik di level supra-desa, desa, dan komunitas, mereka juga



Kegiatan Workshop Perumusan Visi Perubahan di Ratenggaro pada bulan Mei 2019

dihadapkan pada tantangan berupa persepsi-persepsi budaya setempat yang acap kali tidak sejalan dengan agenda perubahan. Untuk merespon tantangan tersebut, tim proyek memerlukan pendekatan khusus untuk menyikapinya.

Di level supra-desa, kegiatan pendampingan dilakukan dengan asistensi kebijakan terhadap Pemerintah Kabupaten SBD untuk menerbitkan regulasi yang kontributif bagi pengembangan pariwisata desa. Sedangkan di level desa, kegiatan itu setidaknya dijalankan dengan mendampingi: *Pertama*, diskusi-diskusi di tingkat komunitas dan desa. Diskusi-diskusi yang digelar membahas identifikasi aset, merancang dan mematangkan obyek wisata yang akan disuguhkan kepada wisatawan, memobilisasi sumberdaya desa guna menunjang wisata desa, dan membuat media-media promosi sesuai dengan kebutuhan lokal. *Kedua*, pelembagaan pengelolaan wisata desa. *Ketiga*, bersama warga merancang dan membangun fasilitas-fasilitas

penunjang kegiatan wisata desa. Pembiayaan pembangunan fasilitas menggunakan pendekatan “*cost-sharing*”, di mana desa didorong memberikan kontribusi sesuai kapasitas keuangannya, sedangkan WLF melalui IRE akan menyediakan dana stimulan secara proporsional mengikuti kebutuhan nyata di lapangan.

### **a. Kampung Adat Ratenggaro (KAR), Desa Maliti Bondo Ate**

Secara khusus KAR didorong agar mengembangkan kegiatan pariwisata desa secara lebih terlembaga. Desa Maliti Bondo Ate difasilitasi untuk membuat peraturan desa sebagai payung hukum dalam mengelola kegiatan pariwisata, serta alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan kegiatan wisata desa. Di level komunitas, pendampingan diarahkan untuk mewujudkan kelembagaan formal yang secara khusus mengelola kegiatan pariwisata di KAR.

Melalui serangkaian diskusi komunitas yang dinamis, akhirnya mereka bersepakat bahwa seluruh kegiatan pariwisata KAR dikelola oleh Lembaga Adat KAR. Serial diskusi komunitas tersebut juga diyakini meningkatkan penerimaan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam mengelola serta mengurangi potensi konflik yang kerap kali muncul di KAR. Kesepakatan tersebut, misalnya meliputi manajemen loket dan buku tamu, manajemen organisasi mencakup keadministrasian dan keuangan, kebersihan lingkungan kampung, keramah-tamahan (*hospitality*), dan aspek-aspek lain terkait pariwisata desa.

## b. Desa Pero Konda

Pendampingan di Pero Konda berupaya memastikan pelebagaan ekonomi lokal berbasis aset desa di bawah skema BUM Desa terwujud. Aset alam yang mereka miliki yakni Pantai Pero dan hutan mangrove potensial dikembangkan sebagai obyek wisata. Selain itu, potensi berlimpahnya hasil tangkapan laut sebagian juga bisa dikemas menjadi obyek wisata kuliner khas Pero Konda. Melalui serial diskusi dan pendekatan kepada tokoh-tokoh kunci desa, kelembagaan ekonomi tersebut bisa terbentuk, bahkan sempat mengalami restrukturisasi kepengurusan guna meningkatkan kinerjanya. Kerja pelebagaan juga diperkuat dengan mendorong inisiasi penerbitan regulasi desa, seperti peraturan desa tentang retribusi tempat wisata. Dukungan anggaran dari desa juga berhasil diperjuangkan, sehingga Desa mengalokasikan anggaran dengan memadai untuk mendukung pengembangan kegiatan pariwisata desa.



Salah satu produk olahan dari potensi hasil laut Desa Pero Konda

## **2.2. Asistensi Teknis untuk Advokasi Kebijakan**

Pemberian dukungan teknis berupa peningkatan kapasitas dan konsultasi intensif kepada sejumlah pihak dalam proyek dilakukan melalui kegiatan ini. Asistensi pada pihak Pemerintah Kabupaten SBD terkait dengan penyiapan regulasi/kebijakan atau program pengembangan pariwisata desa. Sedangkan asistensi teknis kepada pemerintahan desa terkait pemahaman tentang UU Desa, BUM Desa, serta pengembangan wisata desa berbasis aset. Untuk para pengelola desa wisata, fasilitasi asistensi teknis mencakup manajemen desa wisata, menyusun rencana bisnis wisata desa, serta pola pengembangan usaha wisata berbasis potensi lokal. Asistensi teknis bahkan juga diberikan kepada tim lapangan dalam proyek ini yakni terkait pengorganisasian dan pendekatan budaya.

Kegiatan ini juga dilengkapi dengan sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung tersebut misalnya bahan-bahan referensi, buku panduan, serta contoh dokumen regulasi. Keseluruhan bahan-bahan tersebut tentunya sejauh mungkin relevan dengan kebutuhan dan dapat dimodifikasi sesuai dengan konteks lokal. Di samping dukungan berupa bahan, dukungan dapat berupa tenaga ahli dari luar IRE. Pada akhir Desember 2019 misalnya, pengelola proyek mendatangkan seorang ahli pengorganisasian, Awang Trisnamurti. Selama satu bulan, aktivis sosial yang sudah malang melintang di dunia pengorganisasian masyarakat ini menemani tim lokal, secara intensif membimbing FPO dan CO dalam praktik pendampingan.



Tim IRE melakukan monitoring program pada bulan Maret 2020.

Asistensi teknis ini, selain dilakukan secara langsung dengan melakukan kunjungan dan diskusi, juga dilakukan secara daring. Manajemen proyek yang ada di Yogyakarta banyak melakukan komunikasi lewat telepon dan *video call* guna memberikan bimbingan teknis kepada FPO dan CO. Secara faktual, mereka perlu dorongan ekstra dan panduan secara rinci dalam mengambil inisiatif serta langkah taktis manakala mengatasi dinamika sosial dan politik yang ada di lapangan seperti potensi konflik antar warga. Asistensi secara daring ini semakin menemukan ruang kebutuhannya saat pandemi mulai merambah SBD. Hal ini karena pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pembatasan pertemuan dengan warga di luar SBD dan kerumunan. Oleh karena itu, beberapa kegiatan asistensi teknis dilakukan dengan menggunakan fasilitas *zoom-meeting* dan *video-conference*.

Selain melakukan dua kegiatan utama tersebut, proyek ini juga melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pendukung,

antara lain: *Pertama*, studi banding (*cross learning study*). IRE memfasilitasi dua desa pilot melihat langsung bagaimana kegiatan wisata desa diorganisasikan, diharapkan dapat memberikan *insight* dan inspirasi dalam mengembangkan wisata di desa masing-masing. Dengan melihat praktik baik secara nyata akan memudahkan dua desa pilot dalam membayangkan tindakan yang diperlukan untuk mengembangkan wisata desa.



Kegiatan *Learning Sharing* pertama pada bulan November 2019

*Kedua*, berbagi pembelajaran (*learning sharing*). Kegiatan ini dilakukan dengan menghadirkan kedua desa pilot proyek ini dalam satu sesi diskusi interaktif untuk saling berbagi cerita tentang perubahan yang telah mereka alami. Mereka berbagi pengalaman tentang tantangan dan hambatan yang dialami, strategi mengatasi tantangan yang dihadapi, serta menarik pembelajaran baik dari setiap pengalaman di masing-masing desa. Kemudian para pemangku kepentingan di level supra-desa diundang dan diberi kesempatan untuk menanggapi pemaparan dari masing-masing desa dampingan proyek. Para

pemangku kepentingan yang diundang seperti OPD terkait Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Bapelitbangda; perwakilan NGO lokal seperti SHF; institusi pelaku pariwisata misalnya HPI; dan lembaga lain yang ada dalam payung FKP2S. Disamping itu, desa dampingan juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang dukungan terhadap upaya-upaya pengembangan desa wisata kepada Pemda SBD dan pemangku kepentingan lainnya.

*Ketiga*, IRE juga memfasilitasi pelatihan pengelola wisata desa. Kegiatan ini diorientasikan untuk membekali ketrampilan dan pengetahuan terkait pengelolaan dan pengembangan kegiatan wisata desa pada pengelola wisata desa di dua desa pilot. Kegiatan ini biasanya berlangsung selama 3 hari dengan melibatkan sekitar 30 peserta. Sedangkan, pemilihan tema pelatihan menyesuaikan kebutuhan mereka, misal pelatihan tentang manajemen dan tata kelola desa wisata, *hospitality* dalam pengelolaan desa wisata, media promosi di era sosmed, pengelolaan keuangan yang baik, merancang *business plan* BUM Desa, dan sebagainya. Demikian pula dengan penjadwalan pelatihan mengikuti kelonggaran waktu para peserta. Pengelola proyek berupaya mendorong inisiatif dan pelibatan mereka di setiap hal terkait kebutuhan peningkatan kapasitas mereka. Hal ini guna memastikan tumbuhnya kesadaran dan rasa-terlibat serta rasa-memiliki atas apa-apa yang telah mereka dapatkan selama terlibat dalam proyek ini.

### **3. Merespon Pandemi Covid-19**

Memasuki semester-3 perjalanan proyek, Pandemi Covid-19 melanda dunia yang juga berdampak di SBD. Pengetatan akses ke lokasi proyek karena kebijakan nasional dan lokal, serta konsen atas keamanan bersama, menjadi alasan adanya modifikasi model intervensi proyek. Beberapa agenda kegiatan disesuaikan sebagai respon terhadap kondisi Pandemi. Proyek ini juga turut serta berkontribusi dalam penanggulangan Covid-19. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kampanye sosial untuk edukasi kepada desa dampingan terkait Pandemi Covid-19. Materi dan media kampanye sosial yang dipilih adalah memproduksi infografis tentang protokol kesehatan dalam pengelolaan pariwisata desa di masa pandemi dalam bentuk poster dan baliho yang didistribusikan di komunitas. Proyek juga memberikan sumbangsih dengan memberikan seperangkat Alat-alat Pelindung Diri (APD) kepada organisasi pengelola wisata desa.

### **4. Keberlanjutan Program**

Proyek pengembangan wisata desa didesain selalu melibatkan warga setempat, sebagai pihak yang paling berkepentingan atas kegiatan wisata desa tersebut. Begitu juga pihak pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar supaya bisa memberikan dukungan dalam bentuk program, kebijakan, dan anggaran di tingkat desa. Tidak ketinggalan para pelaku wisata desa juga ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam konteks tersebut, pelembagaan di level desa ini penting guna meningkatkan sisi keberlanjutan program pasca-proyek.



Tim IRE sedang berdiskusi tentang jasa usaha wisata dengan pengelola wisata Ratenggaro

Sedari awal proyek dijalankan, mereka yang mewakili entitas desa itu diajak berdialog, merumuskan ide-ide, dan bersepakat atas rute dan tahapan perubahan mereka sendiri. Mereka juga secara bertahap menerima transfer pengetahuan yang dibutuhkan dalam konteks pengembangan desa wisatanya. Upaya ini dimaksudkan untuk memperkuat kesadaran bahwa pengembangan ekonomi lokal berbasis asset ini untuk kepentingan mereka sendiri. Membangun kesadaran ini juga bagian dari upaya memastikan keberlanjutan program.

Upaya membangun keberlanjutan program juga dilakukan di level supra-desa. Pemerintah Kabupaten, khususnya OPD terkait selalu dilibatkan, didorong, dan difasilitasi agar bisa menghasilkan kebijakan dan program yang mendukung pengembangan desa wisata. Upaya ini juga dibarengi dengan melibatkan pemangku kepentingan lain

di luar pemerintah, seperti pengelola hotel, biro perjalanan, pemandu wisata, pengusaha rental mobil, dan juga pegiat sosial yang *concern* pada pengembangan pariwisata. Hal ini ditujukan untuk mendorong sinergi dan mengasah kepekaan untuk membantu desa dalam mengembangkan usaha wisata berbasis komunitas secara berkelanjutan.

Tim IRE sedang berdiskusi tentang peran pemuda dalam pengelolaan BUMDesa Ana Konda (Desa Pero Konda)







## BAB III

# GELIAT MEMBANGUN WISATA DESA: CAPAIAN PROGRAM DEWI SUMBA

### Prawacana

Saat ini pariwisata telah menjadi sektor prioritas pembangunan nasional dan pembangunan desa. Salah satu dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 adalah “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Mengurangi Ketimpangan Wilayah”. Dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah, pengembangan pariwisata menjadi salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Nusa Tenggara selain pada hilirisasi sumber daya alam dan perdagangan.

Demikian pula bagi Kabupaten Sumba Barat Daya, pariwisata menjadi sektor andalan pembangunan kabupaten ini. Namun, pengembangan pariwisata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata tidaklah tepat. Pengembangan pariwisata

## Partisipasi Warga Membangun Loket dalam Balutan Ritual Adat

Keberadaan loket bagi warga Kampung Adat Ratenggaro (KAR), terutama Organisasi Pengelola Wisata (OPW), menjadi momentum dalam mewujudkan mimpi perubahan dalam pengelolaan wisata bersama IRE-WLF. Perjuangan dalam pembangunan loket wisata cukup berat, bahkan dibayang-bayangi konflik di antara warga KAR. Ide awal telah didiskusikan sejak pertengahan Oktober 2019 setelah tercapai kesepakatan bagi hasil retribusi wisata dan parkir antara OPW KAR dengan Pemdes Maliti Bondo Ate. OPW KAR merancang penempatan loket dengan difasilitasi oleh IRE-WLF. Awalnya loket akan dibangun persis di pintu masuk area kampung namun dalam berbagai diskusi disepakati loket dibangun pada jalan masuk menuju KAR agar lebih fungsional, selain menjadi gerbang kampung juga layanan wisata ke pantai.

Desain loket menggunakan miniatur rumah Sumba, uma kalada, nan eksotik di atas lahan tanah adat. Konsep bangunan berasal dari ide dan kesepakatan OPW bersama warga kampung. Loket sebagai pelayanan retribusi wisata KAR dan sekretariat bagi OPW KAR dilengkapi fasilitas area

harus dilaksanakan dalam kerangka kerja pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Oleh karena itu, pariwisata berkelanjutan yang mesti dikembangkan oleh Kabupaten SBD agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Selain itu, desa perlu diperkuat dalam mengembangkan pariwisata berbasis sumber daya alam dan budaya lokal. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan, program/kegiatan, dan anggaran untuk mewujudkannya.

Intervensi Program Dewi Sumba melalui advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas, dan pendampingan yang telah dilaksanakan oleh IRE dan WLF selama 2 tahun telah memberikan beberapa capaian yang berkontribusi pada pencapaian capaian perubahan jangka panjang. Pencapaian dampak Program Dewi Sumba terhadap perubahan jangka panjang da-

pat dilacak jejaknya melalui tahap-tahap program ini serta intervensi programatik yang dilakukan pada seluruh area strategis program ini. Hal ini tampak pada kebijakan di level pemerintah daerah; kebijakan dan pelembagaan wisata desa; sinergi multipihak pengembangan pariwisata SBD; serta kesadaran wisata pada pemerintahan desa, pengelola wisata, dan warga sebagaimana diuraikan berikut ini.

## 1. Menata Kebijakan di Level Pemerintah Daerah: dari Hulu hingga Hilir

Pada awal implementasi proyek ini, tepatnya tahun 2019, Pemda Kabupaten SBD belum memiliki kebijakan yang memadai dalam dukungan bagi pengembangan pariwisata, khususnya wisata desa. Meski pengembangan pariwisata telah menjadi prioritas pembangunan

parkir, toilet, dan dilengkapi bilik kamar ganti bagi wisatawan ketika ingin berfoto mengenakan baju adat. Mereka juga ingin memfungsikannya sebagai galeri seni kain tenun dan cinderamata khas Sumba Barat Daya.

Proses pembangunan loket melibatkan banyak pihak dan tokoh KAR sesuai posisi mereka di desa maupun dalam struktur adat. Pembangunan loket membutuhkan kayu dan sekitar 50 batang bambu utuh untuk atap, dinding, serta lantai. WLF melalui IRE memberikan dukungan pendanaan sejumlah material sementara warga KAR berswadaya tenaga melalui gotong royong mempersiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan dan mendirikan loket.

Sekalipun hanya miniatur rumah adat, namun seluruh ritual adat dijalankan agar direstui oleh leluhur kampung dan berjalan lancar. Tetua adat melakukan ritual Marapu, kondo kalena, sebelum penggalian pondasi bangunan untuk memohon ijin kepada “penghuni” yang ada di lokasi serta meminta dukungan dari arwah para leluhur. Ritual dan persembahan berupa hewan ternak kecil dan sirih pinang dilakukan beberapa kali selama proses pembuatan ukir tiang besar dan pembuatan “leher tiang” tempat memasang gelang yang disebut pakoko pongga. Bahan kayu kadimbil digunakan untuk membuat koro kawimbi yaitu “pangkuan”, atau alas menara (tiang utama). Setelah pondasi dan tiang utama selesai

dikerjakan, maka dilakukan penancangan menara dan menaikkan koro kawimbi. Terakhir, pemasangan alang, yang sebelumnya harus diletakkan dahulu di bawah pohon yang dekat dengan mata air bersama dengan sisa kayu dan tali hutan. Salah satu tokoh adat KAR menuturkan bahwa proses ini dilakukan agar bangunan nantinya terasa “dingin”, yang bermakna sejuk dan memberikan kenyamanan saat ditempati.

Sempat terjadi peristiwa yang membuat pengerjaan pondasi loket harus terhenti yakni kedatangan salah satu dukun adat dari Kahale yang memasang weri (pagar gaib). Rupanya Y. Pati Loghe (YPL), selama ini tinggal di Kahale, tidak setuju atas pendirian loket di atas lahan tanah ulayat tersebut karena sebagai tokoh senior di KAR merasa tidak pernah diajak berdiskusi dan mengizinkan penggunaan tanah adat yang menjadi haknya. Padahal dalam musyawarah adat telah disepakati dan diijinkan oleh salah satu anggota keluarga YPL. Pasca kejadian ini situasi menjadi tegang karena berhembus isu bahwa YPL akan mengirimkan sejumlah orang kepercayaannya untuk mempertahankan tanah tersebut.

IRE sebagai pengelola program mengambil strategi menghentikan sementara proses pembangunan dan berinisiatif memediasi ke Kahale bertemu dengan YPL. Mediasi menghasilkan kesepakatan bahwa klan dari keluarga besar YPL akan dilibatkan dalam OPW KAR dan mengambil peran dalam pengelolaan loket. Akhirnya proses

di Kabupaten SBD, namun jejak kebijakan, program, dan anggaran OPD untuk pengembangan wisata desa masih samar-samar. Komitmen Pemerintah Kabupaten SBD terhadap pengembangan wisata desa agak sulit dilacak pada tahun-tahun silam.

Advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Program Dewi Sumba menemukan momentum dengan adanya visi misi Bupati SBD periode 2019-2024 yang menempatkan pariwisata sebagai salah satu dari Tujuh Jembatan Emas Perubahan di Sumba Barat Daya. Keterbukaan Pemda Kab. SBD dalam merespon program Dewi Sumba memberikan peluang untuk bagi IRE – WLF melakukan intervensi program yang melahirkan kebijakan dan program yang mendukung pengembangan desa wisata. Keberadaan FKP2S juga menjadi arena

yang strategis untuk mendorong isu wisata desa.

Pintu masuk pembahasan tentang pengembangan wisata desa di level kabupaten ditempuh melalui problematisasi tentang isu keamanan dan kenyamanan aktivitas wisata di sejumlah destinasi di desa. Persoalan pungli, pemalakan, kondisi infrastruktur pendukung yang belum memadai, dan lain sebagainya yang terus-menerus dibicarakan di dalam pertemuan *multi stakeholder*, termasuk bersama Bupati. Proses ini telah berhasil meyakinkan Pemerintah Kabupaten SBD bahwa kebijakan dan program sebagai payung pelebagaan wisata di tingkat lokal telah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi.

pembangunan bisa dilanjutkan dan dirampungkan. Proses dan peristiwa ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam bentuk gotong royong, kearifan lokal, dan berbagai peran warga KAR masih sangat tinggi. Nilai dan semangat yang mesti terus dijaga dan digelorkan. Pembelajaran yang dapat dipetik dari konflik yang terjadi adalah pentingnya musyawarah, mekanisme adat, mediasi, dan negosiasi menjadi kunci penyelesaian masalah terlebih di KAR yang selalu ingin menyelesaikan masalah secara “fisik”.

**Gambar 3.1. Strategi Advokasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata**



Sumber: Proposal program, 2018

Strategi advokasi kebijakan dalam program ini telah menghasilkan sejumlah kebijakan dan program yang mendukung pengembangan pariwisata di SBD, khususnya desa wisata.

*Pertama*, Dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 telah memuat agenda dan program pengembangan desa wisata. Selain berhasil, mendorong pengembangan desa wisata sebagai salah satu agenda strategis ke dalam RPJMD tahun 2019-2024, IRE – WLF berhasil dalam mendorong penyusunan renja sejumlah OPD untuk pengembangan desa wisata. Dengan payung kebijakan RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan renja OPD, agenda pengembangan wisata menemukan tautan yang lebih operasional selama 5 tahun mendatang.

*Kedua*, selain RPJMD, jejak program ini dalam kebijakan juga dapat dilacak dari regulasi turunannya. Program ini juga memfasilitasi penerbitan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya No. 50 Tahun 2020 tentang Partisipasi dan Pemberdayaan Desa Wisata di SBD. Regulasi tersebut memuat peran dan tanggungjawab pemerintah daerah, strategi pengembangan, pengelolaan dan pengembangan,

serta pemberdayaan masyarakat di desa wisata. Hal lain yang diatur dalam peraturan tersebut juga mencakup pemasaran dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan desa wisata. Peraturan bupati ini lahir dari kerja kolaborasi yang melibatkan partisipasi dari Dinas Pariwisata, Dinas PMD, FKP2S, dan dukungan Tim Program IRE – WLF.

Secara substansial, program ini berhasil mendorong adopsi prinsip pembangunan desa wisata berkelanjutan dalam peraturan bupati tersebut. Berkolaborasi dengan FKP2S dan para pemangku kepentingan lainnya, Tim IRE-WLF memberikan usulan dalam forum-forum diskusi dan pembahasan draft peraturan bupati. Usulan-usulan yang diajukan dalam forum memperoleh respon positif dari Dinas Pariwisata. Respon positif ini tidak lepas momentum dari adanya kebutuhan pemda akan kebijakan pengembangan pariwisata. Pasal 2 Perbup Kabupaten SBD No. 50 Tahun 2020 tentang Partisipasi dan Pemberdayaan Desa Wisata secara tegas menyebutkan prinsip-prinsip desa wisata.



Kegiatan lokakarya tentang wisata desa di Kabupaten Sumba Barat Daya pada bulan Mei 2019.

### Gambar 3.2. Partisipasi dan Pemberdayaan Desa Wisata

#### Pasal 2

Partisipasi dan Pemberdayaan Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Kelestarian
- b. kemanfaatan
- c. edukasi
- d. kemandirian
- e. keberlanjutan
- f. berbasis aset
- g. kearifan lokal
- h. partisipatif
- i. integratif
- j. inklusif
- k. bertanggung jawab
- l. keterbukaan.
- m. akuntabel

Sumber: Perbup Kabupaten SBD No. 50 Tahun 2020

Regulasi tentang desa wisata juga telah mengadopsi konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang memuat nilai partisipasi dan pemberdayaan. Pada Pasal 3 Perbup Kabupaten SBD No. 50 Tahun 2020 terkait tujuan sudah sesuai dengan konsep *sustainable tourism*. Dalam Pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut ini:



Wawancara dengan warga pada saat Baseline Studi di Pero Konda.

### Gambar 3.3. Tujuan Pengembangan Desa Wisata

#### BAB II

#### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 3

Partisipasi dan Pemberdayaan Desa Wisata diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberikan pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata bagi kelompok, pemerintah desa dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya;
- b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal, adat istiadat dan tradisi, lingkungan, serta tata kehidupan sosial kemasyarakatan;
- c. memastikan partisipasi semua masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Desa Wisata.
- d. mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat lokal.
- e. meningkatkan kualitas layanan pariwisata bagi wisatawan.
- f. meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat Desa Wisata;
- g. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pengembangan Deesa Wisata dan industri pariwisata secara profesional; dan
- h. menyatukan pemahaman tentang partisipasi dan pemberdayaan Desa Wisata.

Sumber: Perbup Kabupaten SBD No. 50 Tahun 2020

*Ketiga*, program ini juga berhasil mendorong penerbitan SK Bupati SBD No. 389 Tahun 2020 tentang Penetapan 24 Desa wisata di SBD dengan memanfaatkan kajian-kajian sudah pernah dilakukan. Penerbitan SK tersebut didasarkan pada hasil kajian riset kolaboratif antara Bapelitbangda SBD dengan LIPI. *Keempat*, inisiatif Bupati SBD mengeluarkan peraturan bupati tentang akselerasi desa wisata menggunakan dana desa. Namun dari Dinas Pariwisata maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) masih dalam proses mengkaji regulasi tersebut.

*Kelima*, Pada tahun 2020, dinas terkait memiliki sejumlah kegiatan dan alokasi anggaran yang mendukung wisata desa. Dinas Pariwisata misalnya, telah merancang Program

Pengembangan Wisata Desa. Program tersebut memfokuskan pada peningkatan kapasitas bagi desa wisata di SBD termasuk KAR. Dinas Pariwisata juga meluncurkan Program Pengembangan Destinasi Wisata seperti ritual pasola, pembangunan sarana prasarana wisata, serta penguatan dan pengembangan wisata dengan alokasi anggaran senilai kurang lebih Rp 4,4 milyar.



Loket wisata dan area parkir di Kampung Adat Ratenggaro

Selain Dinas Pariwisata, pengembangan desa wisata juga menjadi ranah kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam hal ini Dinas PMD berkontribusi dalam memberikan dukungan dalam bentuk inisiasi pembentukan dan pembahasan perda tentang aset desa dan kegiatan pembinaan BUM Desa di SBD yang mengambil bidang usaha wisata desa. Namun pada tahun 2021, program dan anggaran di Dinas Pariwisata untuk mendukung secara langsung pengembangan desa wisata mengalami rasionalisasi sebagai

dampak dari Pandemi Covid-19. Pemotongan anggaran untuk pengembangan wisata desa cukup signifikan karena adanya realokasi dan refocusing APBD untuk merespon dampak pandemi Covid 19.

Intervensi program ini pada level pemerintah melalui OPD telah berhasil mendorong munculnya komitmen dan dukungan dari Pemda SBD. Advokasi kebijakan dan asistensi teknis telah berbuah dukungan berupa kebijakan, program/kegiatan, dan alokasi anggaran terhadap pengembangan wisata desa. Hal ini menunjukkan, program ini telah berhasil menghadirkan payung kebijakan beserta regulasi turunannya untuk memastikan bekerjanya ekosistem pengembangan wisata yang kondusif di SBD. Melalui kerja advokasi kebijakan, program ini memberikan daya dorong bagi Pemerintah Daerah SBD untuk menata kebijakannya, dari hulu hingga hilir, sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pengembangan wisata desa.

Komitmen tersebut menegaskan bahwa Pemda SBD telah menyadari bahwa pengembangan desa wisata membutuhkan regulasi dan organisasi pengelola wisata di desa agar tata kelola dan pengembangan di sektor wisata berkembang dengan baik, tersistem dan berkelanjutan. Tentu saja, capaian tersebut diperoleh dengan kerja kolaboratif antara OPD, Tim IRE-WLF, Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Sumba Barat Daya (FKP2S), dan para pemangku kepentingan pengembangan pariwisata SBD.

## Jalan Marapu dalam Manajemen dan Resolusi Konflik

Hadirnya sebuah loket wisata di jalan masuk menuju Kampung Adat Ratenggaro (KAR) menjadi titik awal yang mengubah tata cara warga dalam menyambut dan menerima wisatawan. Loket ini memberikan cita rasa dan pengalaman baru bagi warga KAR dalam berinteraksi dengan para pelancong baik manca negara maupun domestik. Loket juga menjadi tempat menarik retribusi, dan ruang publik bagi warga untuk meriung di dalam loket ataupun sekedar duduk-duduk di area sekitarnya. Hal ini merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak bertahun-tahun KAR didatangi para pengunjung yang ingin menikmati keunikan kampung adat dengan pesona alam berupa delta dan pantai yang elok.

Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, pada tanggal 23 Februari 2020, terjadi insiden yang sangat mengejutkan, loket KAR. Pada malam itu saksi mata warga KAR melihat api sudah membesar melahap atap ilalang dan karena angin bertiup cukup kencang membuat api dengan cepat membakar sebagian lantai kayu dan dinding anyam bambu. Tak ada yang bisa diperbuat oleh warga untuk menyelamatkan bangunan loket, akses air sangat jauh dan kebetulan tidak banyak orang yang berada di dalam kampung pada malam itu. Loket yang menjadi salah satu penanda

## 2. Komunikasi Budaya sebagai Kunci Pelembagaan Wisata Desa

Desa membangun melalui pariwisata membutuhkan dukungan kesadaran tentang pentingnya kewenangan desa dalam mengelola aset dan potensinya. Namun demikian proses untuk mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan utama yang dihadapi oleh desa yaitu belum terlembaganya wisata desa. Hal ini ditandai dengan minimnya kesiapan, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, belum tumbuhnya kesadaran pemerintah desa untuk merawat dan memanfaatkan aset dan potensi wisata di desa, serta budaya yang belum kompatibel dengan pariwisata. Pelembagaan hal itu membutuhkan proses internalisasi pengembangan wisata desa. Proses internalisasi tersebut dilakukan melalui kegiatan

pendampingan di dua desa dalam program ini agar desa dan komunitas warga memiliki kemampuan memadai mengelola dan mengembangkannya potensi dan aset wisatanya. Kunci pengelolaan internalisasi terletak pada pengelolaan komunikasi multi pihak berbasis nilai-nilai budaya lokal.

Dalam program ini, proses pelembagaan wisata desa di kedua lokasi pilot program dilakukan melalui dua tahapan, yaitu fase persiapan dan fase pendampingan. Fase persiapan program menjadi bagian penting dalam konteks “membuka” cakrawala pengetahuan. Sekaligus, mendudukan cara pandang stakeholder dan komunitas di desa dalam memaknai pengembangan wisata desa dalam semangat dan kerangka Undang-Undang Desa. Kegiatan membuka “cakrawala” dilakukan melalui serangkaian pelati-

perubahan baik dalam pengelolaan wisata KAR pun hangus dilalap si jago merah.

Dua hari pasca kejadian, warga dikoordinir oleh Lembaga Adat melakukan ritual keselamatan agar terhindarkan dari musibah lainnya dan mulai membersihkan sisa puing bekas kebakaran serta membangun kembali loket sementara yang cukup sederhana. Sekalipun muncul isu bahwa kebakaran itu merupakan unsur kesengajaan, namun lembaga adat KAR memilih penyelesaian secara adat melalui upacara tolak bala dan mengangap bahwa itu merupakan peringatan dari leluhur. Mereka menyerahkan semuanya kepada leluhur bila memang ada unsur kesengajaan dari manusia agar mendapatkan hukuman yang setimpal (karma). Namun, bagi beberapa warga, kejadian tersebut tidak masuk akal karena tiba-tiba loket terbakar dengan sendirinya. IRE sangat mengkhawatirkan terbakarnya loket dapat memicu konflik horizontal di antara warga KAR maupun dengan kampung lain. OPW KAR, Kades, dan tim pendamping dari IRE melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kodi Bagedo malam itu juga.

Sikap dan keputusan OPW dan tetua lembaga adat KAR di atas merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam manajemen dan resolusi konflik. Warga tidak ingin muncul dampak negatif karena rasa saling curiga antar warga, apalagi dalam waktu dekat ada agenda pengukuhan Lembaga Adat Pengelola Wisata KAR oleh Bupati Sumba Barat Daya. Terbakarnya

loket KAR merupakan tanda bahwa di KAR memiliki kerentanan yang terpendam berkaitan keputusan-keputusan yang diambil berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wisata. KAR memiliki tantangan pengorganisasian masyarakat yakni dinamika dan potensi konflik yang bahkan seringkali dipicu hal yang sangat sepele. Namun dibalik kerentanan konflik yang kerap terjadi di KAR, secara internal mereka memiliki ruang untuk menyelesaikan konflik yakni menggunakan jalan Marapu, kepercayaan spiritual yang mereka masih yakini secara turun temurun sekalipun mereka telah memeluk agama samawi.

han-pelatihan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor wisata dan studi banding ke Desa Wisata Tebara dimana terletak kampung adat Praijing di Sumba Barat. Kegiatan-kegiatan tersebut cukup efektif menjadi pemantik bagi tumbuhnya kesadaran pemerintah desa dan warga bahwa mereka memiliki potensi dan aset yang selama ini belum tersentuh dengan baik.

Fase Pendampingan untuk pelebagaan wisata desa

di dua lokasi *pilot* program memiliki target terciptanya pengorganisasian wisata desa dengan tata kelola yang baik. Pengorganisasian ini diharapkan menjadi motor penggerak pengembangan wisata desa secara berkelanjutan dan mampu memberikan dampak ekonomi positif. Dampak yang dibayangkan dapat berupa kontribusi adanya Pendapatan Asli Desa (PAD), terbukanya lapangan pekerjaan, dan kesempatan berusaha baru bagi warga yang bermuara pada peningkatan kualitas kehidupan warga desa.

Dalam konteks tersebut, IRE melakukan dua hal yang dikerjakan secara simultan dalam mendampingi desa, yaitu mendorong pemerintahan desa menerbitkan kebijakan dan regulasi yang mengatur kegiatan wisata desa dan sekaligus menginisiasi pembentukan organisasi di tingkat lokal yang

akan mengelola dan mengembangkan wisata desa. Pola pendekatan yang dilakukan di kedua desa pilot tersebut serupa namun memiliki perbedaan dalam prosesnya mengikuti konteks lokal di masing-masing desa. Hal ini berkaitan dengan fokus area yang berbeda, Pero Konda memiliki ruang lingkup area dalam satu desa sedangkan Maliti Bondo Ate fokus pada satu kampung adat.

Sebagaimana telah disinggung pada Bab II, internalisasi kelembagaan wisata desa ditempuh menggunakan pendekatan kerangka kerja *Theory of Change*. Teori tersebut bekerja dengan menetapkan visi perubahan yang sangat vital untuk meletakkan pondasi kesepakatan bersama berbagai elemen di desa dan komunitas. Visi perubahan disertai tahapan-tahapan pencapaian perubahan (milestone), asumsi-asumsi faktor kunci perubahan, serta peran dan kontribusi setiap aktor di dalam mewujudkan mimpi atau visi bersama tersebut. Perumusan visi perubahan tersebut tentu saja melibatkan seluruh elemen yang ada di desa, antara lain pemerintahan desa, lembaga desa, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta komunitas warga di Desa Pero Konda maupun Kampung Adat Ratenggaro di Desa MBA

### **3.1. Desa Pero Konda**

Rumusan visi perubahan di Pero Konda menetapkan agenda perubahan yaitu *“Mewujudkan Pero Konda sebagai Desa Wisata yang tertata dan terkelola dengan baik sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya akses pekerjaan dan pendapatan masyarakat desa pada Desember 2020”*. BUM Desa disepakati sebagai aktor yang mengelola wisata desa dengan melibatkan peran

aktif masyarakat Pero Konda. Pemerintahan desa berperan memberikan dukungan regulasi, program, dan anggaran.

Langkah strategis yang diputuskan untuk menata kelembagaan pengelolaan wisata di Pero Konda adalah melakukan reorientasi dan reorganisasi BUM Desa Ana Konda yang dibentuk pada tahun 2017 namun kondisinya “mati suri”. BUM Desa Pero Konda pada saat itu didirikan sekedar menjalankan “proyek” bantuan dari Kabupaten SBD sehingga pemerintahan desa maupun warga desa Pero Konda tidak cukup memahami arti penting pembentukan dan operasionalisasi BUM Desa sebagai lembaga desa yang diberi mandat sebagai *prime mover* ekonomi desa.

Dinamika agenda reorganisasi BUM Desa tersebut sempat tersendat karena lambannya respon pemerintah desa maupun tokoh-tokoh masyarakat di Pero Konda. Agenda pembahasan regulasi pendirian BUM Desa dan penyusunan *bussiness plan* seringkali harus tertunda. Muncul keraguan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam merespon gagasan pengembangan wisata desa, sekalipun antusiasme warga sudah tumbuh. Situasi stagnasi dalam pencapaian *output* program yang disebabkan oleh beberapa faktor.

*Pertama*, berakhirnya masa jabatan Ali Pua Story sebagai kepala desa berdampak cukup signifikan. PLT Kades Pero Konda sangat berhati-hati dalam menindaklanjuti agenda-agenda pelebagaan wisata desa. Sedangkan Sekretaris Desa, Kaur, maupun BPD Pero Konda juga

bersikap pasif dalam merespon sejumlah agenda yang harus dilakukan berdasarkan visi perubahan yang telah ditetapkan. *Kedua*, terjadi tarik ulur yang cukup lama antara pemerintah desa dan BPD terkait personil yang akan ditempatkan mengelola BUM Desa. *Ketiga*, tidak adanya aktivitas forum warga di Pero Konda sehingga muncul kesulitan mengartikulasikan aspirasi tentang pengembangan wisata desa.

Selain itu, tingginya aktivitas ekonomi warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan pedagang, mempengaruhi responsifitas warga pada isu pengembangan wisata. Perputaran uang dari hasil melaut dan berdagang setiap harinya bisa mencapai jutaan rupiah, sehingga warga Pero Konda tidak terlalu memperhatikan, dan berminat, pada potensi ekonomi lain selain hasil dari melaut dan berdagang.

Untuk memecah kebekuan tersebut, Tim IRE-WLF melakukan beberapa kegiatan tambahan yang agak keluar dari kerangka program. Kegiatan tersebut misalnya mengadakan sejumlah diskusi tentang relasi pemdes, kelembagaan desa, dan masyarakat untuk mengatasi rendahnya inisiatif dan partisipasi warga dalam proses merumuskan agenda-agenda pengembangan wisata pantai. Posisi Pero Konda yang strategis sebagai pusat kuliner dalam paket trip wisata SBD dan kemampuan mengolah kuliner oleh kelompok perempuan menjadikannya potensial mengembangkan sebagai pusat kuliner laut. Gagasan Tim IRE yang menempatkan pantai Pero Konda sebagai *hub* atau titik hubung aktivitas pariwisata di wilayah Kodi akhirnya

### Geliat Wisata Pantai Pero di Tangan Anak Muda

BUM Desa Pero Konda yang dimotori oleh anak-anak muda sejak bulan Februari 2021 mulai membuka loket masuk ke area wisata Pantai Pero. Mereka aktif bergiliran menjaga loket yang dimulai dari pagi hingga menjelang malam. Sebagai pengelola wisata desa, mereka memastikan ketertiban, kebersihan, dan keamanan kawasan pantai selalu terjaga dengan baik. Setiap pengunjung akan diberikan tiket retribusi dan diarahkan ke area parkir. Mereka juga mengajak wisatawan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di Pantai Pero.

Sebelum loket retribusi wisata resmi dibuka, mereka yang rata-rata berusia 20-an tahun ini bergotong royong melakukan penataan kawasan pantai. Mereka membuat pagar, menyiapkan area parkir, membuat loket dan portal, sembari menyosialisasikan Peraturan Desa yang menjadi dasar pemungutan retribusi dan parkir di kawasan pantai.

menjadi pemicu munculnya semangat yang lebih besar pada aktor-aktor perubahan di Pero Konda untuk mengembangkan wisata pantai dan kuliner.

Desa Pero Konda akhirnya menerbitkan Perdes nomor 3 tahun 2019 tentang Pembentukan BUM Desa Ana Konda yang salah satu bidang usaha yang dikelola adalah wisata desa. Selain itu pada awal tahun kedua berhasil menetapkan Perdes nomor 7 tahun 2020 tentang Pungutan Desa yang didalamnya mengatur retribusi wisata dan Perdes nomor 8 tahun 2020 tentang Pengembangan Wisata Desa. Salah satu poin penting dari Peraturan Desa nomor 8 tahun 2020 ini di

dalamnya memuat pengaturan tentang keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mengelola potensi dan aset yang dimilikinya sekaligus memastikan kondisi lingkungan alam, sosial, dan budaya dapat terjaga dengan baik.

Pada tahun kedua proses pelebagaan wisata desa lebih banyak fokus pada penataan organisasi pengelola wisata. Organisasi pengelola wisata didorong *m e n g e m b a n g k a n* dan menjalankan kegiatan wisata desa secara profesional, termasuk inovasi dalam mengembangkan sejumlah jasa usaha wisata. Pada fase ini pendampingan di Pero Konda masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Ada tiga hal yang harus diatasi, yaitu: *pertama*, kesulitan dalam mempertemukan pengurus BUM Desa dengan pemerintah desa untuk membahas penyelesaian bangunan *sunset poin* dan memulai aktivitas wisata desa; *kedua*, pengorganisasian komunitas atau kelompok warga di Pero Konda agar terlibat dalam aktivitas wisata desa

Salah satu anak muda, Mira Samana, sangat aktif memberikan himbauan kepada wisatawan yang masih belum memahami beberapa peraturan di Pantai Pero seperti parkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Himbauan ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung lainnya mengingat kawasan pantai lahannya terbatas. Sosialisasi ini untuk menegakkan ketertiban di kawasan Pantai Pero yang sebelumnya terkesan semerawut dan tidak terkelola dengan baik.

Mira Samana menjalani aktivitas rutin dengan penuh tanggung jawab dan baru beranjak meninggalkan loket setelah memastikan semua pengunjung telah keluar dari kawasan pantai. Mira dan kawan-kawannya sangat senang karena daya upayanya selama ini telah membuahkan hasil yang signifikan, baik dari segi pendapatan retribusi maupun kenyamanan di area pantai yang telah diapresiasi oleh warga. Mereka mengelola wisata desa di bawah naungan BUM Desa Ana Konda ini optimis kalau pengelolaan wisata pantai Pero akan berkembang semakin baik, apalagi warung kuliner dan

fasilitas toilet juga telah selesai dibangun.

Loket wisata yang dikelola oleh BUM Desa Ana Konda ini menjadi “kantur kecil” bagi Mira dan anak-anak muda di Pero Konda dalam mensosialisasikan informasi peraturan wisata kepada pengunjung dan mengembangkan diri mereka menjadi pelaku wisata di tingkat lokal. Semua dikerjakan bukan saja untuk diri mereka namun lebih jauh lagi untuk keberlanjutan aset desa yang dimiliki oleh warga Pero Konda. Saat ini wisatawan yang berkunjung di Pero Konda sudah merasa lebih nyaman menikmati keindahan alam Pantai Pero yang konon merupakan salah satu pantai dengan pancuran ombak di karang dan sunset terindah yang ada di pulau Sumba.

karena warga menunggu BUM Desa menjalankan wisata pantai terlebih dahulu; dan ketiga, penyelesaian penyusunan *business plan* pengembangan jasa usaha wisata pendukung/tambahan di kawasan pantai Pero oleh Pengurus BUM Desa.

Ketokohan Ali Pua Story masih memegang peran penting dalam memberikan pengaruh di desa. Tidak bisa dipungkiri pengaruh tersebut “dimanfaatkan” oleh IRE pada tahun kedua sebagai

strategi untuk mendorong BUM Desa dan Pemdes lebih pro aktif dalam mempersiapkan operasionalisasi wisata pantai Pero. PLT Kepala Desa dan Ali Pua Story berperan besar dalam mendorong pergerakan BUM Desa dalam menyelesaikan pembangunan *sunset poin* dan agenda-agenda operasionalisasi wisata pantai Pero. Strategi kedua yang dilakukan oleh IRE adalah mendorong pembentukan tim teknis di BUM Desa Ana Konda yang secara khusus mengelola wisata pantai Pero. Keterlibatan sepuluh orang anak muda Pero Konda memberikan dampak yang sangat signifikan. Percepatan penyelesaian sejumlah hambatan selama beberapa bulan dipecahkan dengan memperbesar peran generasi muda Pero Konda.

Pada bulan Februari tahun 2021, pantai Pero telah dibuka menjadi destinasi wisata yang menerapkan retribusi wisata sebesar Rp. 2000, - per orang. Pengelola wisata pantai Pero melakukan penataan kawasan pantai agar setiap pengunjung yang datang lebih nyaman, tertib, dan terjaga kebersihannya, terutama dari sampah non organik. Pengembangan wisata pantai juga memperhatikan kepentingan nelayan, agar aktivitas nelayan tidak terganggu dengan kegiatan wisata. Bahkan justru dapat saling melengkapi dan terjadi relasi mutual yang saling menguntungkan.

### **3.2. Kampung Adat Ratenggaro, Desa Maliti Bondo Ate**

Visi Perubahan di Kampung Adat Ratenggaro yang ditetapkan bersama dengan Pemerintahan Desa Maliti Bondo Ate adalah *“Kampung Adat Ratenggaro (KAR) pada Desember 2020 menjadi kampung wisata yang lestari guna meningkatkan pendapatan warga, melalui semangat kebersamaan”*. Ada tiga kata kunci dalam menentukan visi perubahan tersebut, yaitu Kampung Adat, Lestari, Kesejahteraan. Aktor strategis yang berperan dalam mencapai mimpi perubahan tersebut adalah pemerintahan desa, lembaga adat, dan warga Kampung Adat Ratenggaro.

Pemerintah desa Maliti Bondo Ate dan warga Ratenggaro justru mengalami “lompatan” pada pencapaian output program dibandingkan dengan Desa Pero Kon-da. Manajemen program Dewi Sumba sejak awal pendampingan justru memprediksikan bahwa Ratenggaro

### Bahasa Keramahan Lokal dan Ritual Sembelih Ternak

Di Kampung Adat Ratenggaro, kala pertama bertandang, pengunjung diminta untuk menyembelih hewan ternak. Bagi tamu atau saudara yang muslim, biasanya diminta potong ayam, kambing, kuda, sapi, atau bisa juga kerbau. Untuk yang non-muslim bisa ternak apa saja, termasuk babi. Hewan ternak itu rupanya telah disiapkan warga, sebagai bagian dari upacara penyambutan kedatangan tamu. Kemudian, hewan ternak tadi menjadi bagian dari menu jamuan makan bersama. Dapat pula, ternak tersebut tidak selalu disembelih dan dimasak untuk jamuan bersama saat itu, tapi juga bisa diterimakan dan dibawa pulang.

akan berproses lebih lambat karena *gap* sumberdaya manusia.

Pada tahun pertama, Pemerintah Desa Maliti Bondo Ate telah berhasil menetapkan sejumlah regulasi tingkat desa. Regulasi pertama yang diterbitkan adalah Perdes Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan Desa ini mengatur pengembangan wisata desa berkelanjutan berlandaskan pada strategi pelibatan partisipasi aktif masyarakat lokal dengan memperhatikan kelestarian alam, adat budaya, dan nilai-nilai sosial ekonomi. Hal ini

juga senada dengan komitmen tokoh dan warga KAR bahwa pengelolaan wisata di kampung sebagai cara melestarikan situs kubur batu, adat budaya, kawasan pantai, dan muara, yang akan diwariskan kepada anak cucu Ratenggaro.

Peraturan desa tersebut disusul dengan penetapan Perdes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Desa, Peraturan Desa No. 6 Tahun 2019 tentang Pendirian BUM Desa, serta SK Kepala Desa nomor 401 tahun 2020 tentang Penetapan Lembaga Adat KAR sebagai pengelola wisata desa di Ratenggaro, yang dikukuhkan pada bulan Maret 2020 oleh Bupati Kabupaten SBD.

Selain itu Pemerintah Desa juga memberikan dukungan langsung penyediaan sarana dan prasarana wisata dengan pembangunan toilet dan bak penampung air bersih dari alokasi dana desa.

Pada tingkat kampung adat, tepatnya awal *midterm* kedua (enam bulan kedua) Kampung Adat Ratenggaro bersama Pemerintah Desa Maliti Bondo Ate telah berhasil menyepakati bentuk organisasi beserta struktur pengelola wisata, bahkan telah memfinalisasi sejumlah kebijakan/peraturan pengelolaan wisata. Pemdes Maliti Bondo Ate bahkan melakukan inisiasi pembentukan BUM Desa yang salah satu tujuannya diproyeksikan mengelola wisata desa dalam ruang lingkup kawasan desa melalui pengembangan agrowisata dan kegiatan wisata di sembilan kampung adat yang lain.

Penetapan lembaga adat sebagai organisasi pengelola wisata di Ratenggaro dilakukan melalui beberapa kali musyawarah adat yang melibatkan seluruh perwakilan dari *uma kalada* yang ada di dalam kampung. Hukum adat yang berlaku di KAR, dan juga kampung adat di Sumba pada umumnya mengatur bahwa semua

Menyembelih ternak oleh tamu sendiri ini, sebagai ritual khusus tak sering-sering mereka praktikkan. Ritual itu biasanya hanya dilakukan ketika mereka menerima kunjungan kerabat dekat yang lama terpisah dan baru pertama kali berkunjung kembali. Di samping itu, tradisi ini juga diperuntukkan bagi seseorang atau sekelompok orang yang mereka anggap memiliki jasa baik dalam kehidupan mereka. Menurut penuturan warga Ratenggaro, ritual itu sebagai bentuk penerimaan dan penghargaan. Tradisi tersebut merupakan bahasa keramahan lokal terhadap tamu.

hal yang menyangkut urusan kampung sebagai satu kesatuan komunitas adat harus melibatkan secara langsung seluruh keluarga dari seluruh rumah besar (*uma kalada*). Oleh karena itu, struktur kepengurusan Organisasi Pengelola Wisata (OPW) KAR terdiri dari perwakilan dari masing-masing rumah besar di kampung Ratenggaro. Kepemimpinan dalam struktur OPW KAR dipegang oleh rumah induk *Ama* dan *Ina*. Hal ini harus dipahami bahwa dalam struktur adat di Ratenggaro, pihak *Ama* (bapak) dan *Ina* (ibu) merupakan keluarga inti yang memegang peranan dominan dalam kepercayaan Marapu di dalam kampung.

Beberapa tantangan dan hambatan proses pelem-bagaan wisata desa di Ratenggaro dan Desa Maliti Bondo Ate pada tahun pertama. Tantangan pertama adalah munculnya konflik antarwarga. Sempat terjadi kasus penganiayaan terhadap seorang warga oleh sesama warga KAR yang dipicu oleh disinformasi terkait dengan pengaturan jasa wisata kuda tunggang. Kejadian itu menyebabkan dihentikannya agenda diskusi dalam merumuskan tata kelola wisata hampir satu bulan lamanya. Konflik berikutnya, terjadi bulan November 2019 dimana nyaris terjadi pertikaian antar kelompok keluarga besar warga KAR yang juga dipicu oleh disinformasi dalam pembangunan loket dan area parkir di tanah ulayat kampung Ratenggaro. Selain itu terjadi kebuntuan antara Pemdes dengan OPW KAR terkait kesepakatan tentang besaran prosentase pembagian hasil retribusi wisata ke desa dan tata hubungan OPW KAR dengan BUM Desa. Dinamika tersebut juga cu-

kup menyita energi dan waktu selama pendampingan, bahkan berdampak pada aktivitas program.

Tim IRE menempuh strategi komunikasi yang lebih intensif kepada para pihak, pola pendekatan personal yang dilambri dengan kesabaran dalam memberikan pemahaman pada konteks persoalan tersebut. Hal tersebut menjadi kunci dalam menjembatani perbedaan pendapat di antara mereka. Tim IRE senantiasa mengedepankan musyawarah untuk mencapai kompromi jalan tengah yang seimbang. Kepercayaan kepada IRE sebagai pendamping desa menjadi modal dalam membangun pemahaman dan pengetahuan bagi para pihak dan warga KAR.

Organisasi Pengelola Wisata KAR mulai menjalankan pengelolaan wisata desa berdasarkan peraturan umum dan khusus yang telah ditetapkan sebelumnya pada bulan Februari 2020. Saat itu, Bupati SBD mengukuhkan KAR sebagai destinasi wisata pertama di Kabupaten Sumba Barat Daya yang dikelola mandiri oleh komunitas lokal melalui upacara adat pada tanggal 7 Maret 2020. Momentum ini dicatat sebagai puncak proses pelebagaan wisata desa dengan dukungan regulasi dari pemerintah desa. Hingga awal tahun 2021, Pengelolaan wisata di KAR telah menyetorkan dana kontribusi bagi hasil retribusi wisata kurang lebih 16 juta rupiah sebagai Pendapatan Asli Desa.

Kampung adat dan pantai Ratenggaro setelah pengelolaan wisata berjalan pun telah mengalami perubahan yang cukup drastis. Kondisi area kampung terlihat lebih rapi dan bersih. Setiap rumah tersedia

tempat sampah yang dibuat dari karung goni. Warga juga lebih responsif dalam menerima pengunjung. Para pemandu wisata mengakui bahwa perubahan besar telah terjadi di Ratenggaro dalam mengelola aktivitas wisatanya.

Pelembagaan wisata desa di Maliti Bondo Ate dan Pero Konda telah memperoleh apresiasi yang tinggi dari Pemda Sumba Barat Daya. Salah satu bentuk pengakuan dari Pemda SBD adalah komitmen mereplikasi model yang telah ditempuh di dua desa pilot program tersebut bagi desa-desa lain yang memiliki potensi dan aset wisata. Pencapaian piloting wisata desa di Ratenggaro dan Pero Konda menumbuhkan harapan besar masa depan sektor pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan desa dan masyarakat di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bupati SBD Kornelius Kodi Mete, pada saat pengukuhan Organisasi Pengelola Wisata KAR, bahwa aset dan potensi wisata yang dikelola dengan baik merupakan harta tak ternilai, yang nantinya mampu mengatasi persoalan klasik di tanah Sumba yaitu ketidakberdayaan dan kemiskinan.

### **3. Sinergi Multipihak: Berbagi Peran untuk Pariwisata Inklusif**

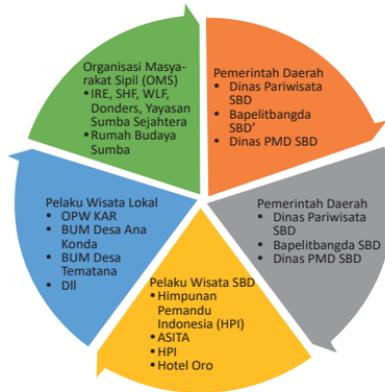
Program Dewi Sumba telah berhasil mendorong beberapa perubahan positif dalam pengembangan wisata desa di Sumba Barat Daya, yakni lahirnya kebijakan inklusif tentang pengembangan desa wisata di tingkat desa dan kabupaten.

Kebijakan inklusif di SBD tersebut lahir dari proses yang inklusif pula. Hal itu mewujudkan dalam kerja kolaboratif multipihak melalui wadah kemitraan inklusif bernama Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Sumba Barat Daya (FKP2S). Awalnya, forum yang dibentuk tahun 2017 ini merupakan wadah multipihak yang terdiri dari unsur pemerintah daerah SBD, pelaku usaha wisata dan pemerhati kepariwisataan.

Awalnya Pelaku wisata desa yakni BUM Desa Pero Konda dan OPW KAR, belum menjadi bagian dari wadah multipihak ini. Kehadiran Program Dewi Sumba secara tidak langsung telah menyuntikkan spirit inklusif melalui agenda pengembangan wisata desa ke dalam agenda FK2PS. Masuknya program ini berhasil mendorong pentingnya agenda pengembangan wisata desa sebagai bagian industri wisata di SBD sekaligus mengakui bahwa pelaku usaha wisata desa menjadi pihak yang mesti dirangkul.

Pendampingan IRE-WLF di SBD akhirnya mendorong dua desa untuk dilibatkan dalam FK2PS. FK2PS sendiri sejak Desember 2019 telah melakukan berbagai forum diskusi dan musyawarah membahas isu pengembangan desa wisata. Ringkasnya, Program Dewi Sumba telah membuka ruang kesadaran para pemangku kepentingan pariwisata di SBD bahwa pariwisata merupakan sektor penghidupan banyak orang dan karena itu harus dikelola secara inklusif.

**Gambar 3.4. Unsur Forum Multipihak Pengembangan Pariwisata SBD**



Para aktor perubahan yang tergabung dalam FK2PS memiliki peran dan kontribusi yang saling menguatkan dalam proses pengembangan desa wisata yang inklusif. Adanya pembagian peran dan kerja kolaboratif tersebut saling berkontribusi pada lahirnya berbagai capaian dan kemenangan bersama di tingkat kebijakan, kelembagaan dan aksi lokal. FK2PS melakukan aktivitas diskusi, musyawarah, advokasi kebijakan, dan sosialisasi terkait pengembangan desa wisata yang inklusif. Pelibatan kedua desa dalam FK2PS telah menginspirasi aktor perubahan lainnya untuk dapat melakukan pengembangan desa wisata secara inklusif melalui payung kebijakan di tingkat kabupaten, desa, dan pelebagaan kelompok wisata di tingkat desa. Hadirnya program Dewi Sumba telah memberikan perspektif baru bagi arah gerak forum yang lebih inklusif.

**Gambar 3.5. Peran dan Fungsi Aktor Perubahan dalam Forum *Multistakeholders***



Sumber: Laporan Endline Study, 2021

#### **4. Perubahan Sikap dan Perilaku sebagai Praktik Sehari-Hari**

Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan lembaga desa Kampung Adat Ratenggaro (KAR) dan Pero Konda merupakan salah satu yang diharapkan terwujud dalam program ini. Aktivitas Program untuk membuat masyarakat Desa Pero Konda dan Maliti Bondo Ate benar-benar mengenal dan memahami konsep “pariwisata” yang dikelola secara kolektif harus dibangun secara perlahan-lahan. Pada awal IRE memulai proses pendampingan, di kedua desa, sudah memiliki potensi wisata. Bahkan di Kampung Adat Ratenggaro sudah ada aktivitas wisata, meski masih dikelola secara individual dan belum dikelola sebagai usaha kolektif apalagi dilembagakan. Masyarakat juga belum menyadari sepenuhnya kontribusi pariwisata sebagai basis bagi

pengembangan ekonomi lokal desa. Sekaligus, pariwisata sebagai alternatif mengatasi kemiskinan dan ketimpangan melalui pengelolaan sumber daya lokal secara mandiri dan penciptaan lapangan kerja (IRE, 2018; Caswell, 2014).

Kendati demikian, dalam perkembangannya tercatat perubahan-perubahan positif terhadap sikap dan perilaku masyarakat dan lembaga desa KAR dan Pero Konda. Perubahan tersebut terekam dalam kunjungan terakhir Tim IRE ke KAR dan Pero Konda pada Februari 2021 lalu, dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang mengarah pada konsep “sadar wisata” dan “cara hidup sehari-hari”. Perubahan-perubahan tersebut akan dijabarkan dalam poin-poin berikut, hasil telaah dan evaluasi IRE selama berproses bersama berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan desa di KAR dan Pero Konda.



Sunset Poin di Pantai Pero Konda

## **Pelebagaan Sadar Wisata**

Awalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa struktur dan relasi adat yang kompleks dalam masyarakat KAR menjadi tantangan dalam upaya mengembangkan pengelolaan wisata secara kolektif. Hal itu berhubungan dengan perbedaan cara pandang dan penentuan keputusan, misalnya dalam hal kedudukan OPW KAR atau persentase kontribusi bagi hasil retribusi wisata KAR. Namun, setelah berbagai proses negosiasi melalui pertemuan dan mediasi baik formal maupun informal perbedaan-perbedaan tersebut dapat dicairkan dengan hasil komitmen kolektif pengelolaan wisata dan tumbuhnya rasa kepemilikan bersama terhadap desa. Hal ini ditandai dengan ucapan Kepala Desa KAR yang “bersumpah darah” bahwa ia akan berjuang mati-matian untuk menjaga desa dari resiko apapun, termasuk pihak luar, yang dapat memecah belah keutuhan dan merusak aset sosio-kultural kolektif warga desa.

Demikian pula perubahan sikap dan perilaku juga terjadi di Pero Konda. Agenda penyegaran BUM Desa Ana Konda awalnya tidak terlalu berjalan karena sikap pasif Ketua BUM Desa sebelumnya. Namun setelah digantikan anak-anak muda yang proaktif, pariwisata perlahan-lahan berjalan dan turut memantik aktor-aktor lain di dalam desa yang semula apatis mulai menampakkan geliatnya. Perubahan-perubahan sikap positif dalam membangun dan mengelola wisata juga semakin dikukuhkan dengan penciptaan berbagai regulasi dan dukungan di tingkat desa oleh pemerintah desa. Misalnya, Pemerintah Desa Pero Konda pada tahun 2019 menyeratkan modal untuk BUM Desa Ana Konda sebesar Rp30 juta.

### Dampak Positif Pengelolaan Wisata Pantai Pero Konda

Warga Desa Pero Konda telah merasakan perubahan dengan hadirnya suasana ketertiban dan kenyamanan sejak kawasan Pantai Pero dikelola oleh BUM Desa Ana Konda. Situasi tersebut dirasakan bukan hanya di kawasan pantai saja tetapi hingga ke seluruh jalan utama desa yang juga merupakan akses dari dan menuju Pantai Pero.

Sebelum pantai dikelola oleh BUM Desa “Ana Konda”, setiap sore hari, terutama akhir pekan, jalan masuk dari ke desa dan ke arah Pantai Pero menjadi tempat ajang “ekspresi” anak muda pengendara sepeda motor. Mereka acap kali melaju dengan kecepatan tinggi dengan bunyi knalpot yang sangat bising, bahkan tidak jarang mereka mengendarai motor secara berombongan. Kawasan Pantai Pero pun sering menjadi arena kebut-kebutan. Perilaku mereka yang berasal dari berbagai desa di sekitar Bondo Kodi ini membuat para orang tua was-was dan melarang anak-anaknya bermain di halaman rumah pinggir jalan maupun di kawasan Pantai Pero. Bahkan ekspresi berlebihan dari anak-anak muda itu terkadang berbuntut keributan di antara mereka sendiri yang pada gilirannya merepotkan tokoh dan warga Pero Konda untuk melerai keributan itu.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wisata akan berhasil apabila ditopang dari bawah dan juga dari atas. Dua komponen kesadaran wisata, partisipasi dan dukungan menjadi kunci membangun sadar wisata. Kesadaran akan hak dan kebutuhan ditumbuhkan dan dikembangkan melalui diskusi penentuan keputusan strategis, penciptaan kelembagaan organisasi pengelola wisata dan BUM Desa yang adil dan representatif, dan penguatan regulasi.

### Perubahan Sikap sebagai Cara Hidup Sehari-Hari

Paska program Dewi Sumba, perubahan-perubahan sikap dan perilaku di kalangan warga juga berbuah menjadi beberapa kondisi yang dapat dinikmati—bukan hanya oleh wisatawan tapi juga dapat dirasakan warga KAR dan Pero Konda. Aspek ke-

tertiban, kenyamanan, dan keramah-tamahan menjadi nilai baru yang mewujud bukan saja dalam aktivitas pelayanan wisata namun menjadi praktik sehari-hari warga di Pero Konda dan KAR.

**Ketertiban.** Pada aspek ini program Dewi Sumba melakukan inisiasi Sistem Tiket Satu Pintu. Penerapan sistem ini di KAR membuat pengaturan wisata menjadi lebih pasti dan tidak membingungkan wisatawan. Awalnya, para pemandu wisata lokal yang mengantarkan tamu mengeluh tentang ketidakpastian dalam penentuan harga jasa wisata maupun parkir, yang membingungkan wisatawan. Wisatawan juga kerap merasa tidak nyaman karena selalu diikuti oleh anak-anak kecil yang meminta uang ataupun menawarkan kerajinan dengan setengah memaksa.

Adanya sistem tiket dengan karcis khusus untuk jasa usaha wisata mengubah hal ini. Sistem ini mencegah adanya

Saat ini, pengendara motor tidak bisa lagi bebas keluar masuk dengan cara kebut-kebutan sejak BUM Desa melakukan penataan kawasan pantai dan memasang portal di loket wisata yang berada di jalan masuk Pantai Pero. Pengelola wisata dengan dibantu oleh keamanan desa, Babinsa, dan Babin wisata yang mendapat tugas perbantuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten SBD, melakukan sosialisasi ketertiban dan keamanan agar kawasan pantai kondusif bagi aktivitas wisata. Hal ini telah berdampak signifikan menekan perilaku yang tidak tertib dan abai pada keamanan tersebut.

Penataan dan pengelolaan kawasan Pantai Pero mendapatkan apresiasi dari warga desa. Bapak Guntur, salah satu warga, menyatakan, "Sekarang tidak ada lagi yang berani kebut-kebutan di jalan desa, juga tidak bisa masuk ke pantai tanpa (mematuhi) peraturan, sudah ada portal dan pengelola BUM Desa yang mengatur Pantai Pero". Saat ini, ketika sore hari terlihat banyak anak-anak kecil bermain ditemani orang tua mereka. Warga pun telah memiliki area publik yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sambil menikmati keindahan alam Pantai Pero.

pengenaan tarif yang berbeda di antara para pelaku usaha perseorangan yang selama ini menawarkan jasa-jasa wisata seperti penyewaan baju adat, penyewaan kuda, dan penjualan cinderamata, dan lain lain sebagainya.



Pengukuhan Pengurus Lembaga Adat yang mengelola destinasi wisata di KAR oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya pada bulan Maret 2020.

Kondisi tersebut bahkan bukan hanya menciptakan tertib namun juga menghadirkan rasa aman. Di KAR tidak ada lagi pungutan liar, pemalakan oleh pemuda di daerah pantai, dan pemaksaan pada wisatawan untuk membeli cinderamata atau melakukan jasa wisata yang kerap dilakukan oleh anak-anak setempat. Hal ini dapat terealisasi setelah KAR memberlakukan sistem tiket dan pengelolaan sesuai peraturan umum dan khusus yang telah ditetapkan. Biaya karcis masuk tersebut sudah termasuk seluruh area yang ada di KAR, yakni di dalam kampung dan pantai. Selain itu, warga pun sepakat bahwa seluruh jasa usaha wisata di kampung juga akan dikenakan karcis khusus, di mana sebesar

10% harga tiket jasa usaha wisata menjadi pemasukan kas OPW. Adanya imbauan dari Kepala Desa Maliti Bondo Ate dan Pengurus Harian OPW agar tidak terjadi pemalakan dan gangguan-gangguan keamanan pun juga berkontribusi pada penurunan kasus pemaksaan dan pemalakan.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Pero Konda. Masyarakat Pero Konda pun kini telah melakukan penataan dengan turut membangun loket dan areal parkir, memungut retribusi, dan menjaga keamanan wilayah pantai yang berbuah pada ketertiban pariwisata di pantai. Sebelum dibangun sistem loket, biasanya terdapat fenomena trek-trekan atau balapan liar anak-anak muda luar desa di malam hari. Hal ini acap kali membuat para ibu Pero Konda risau dan melarang anaknya keluar malam. Karena adanya sistem tiket dan pembangunan loket, anak-anak muda tersebut kini tak lagi bisa masuk ke areal desa dan melakukan balapan liar tersebut.

***Kenyamanan.*** Aspek kenyamanan secara fisik dapat ditandai dengan penataan lingkungan yang bersih, rapi, dan asri. Sebelum Program Dewi Sumba berjalan, secara fisik KAR kurang tertata rapi. Semula KAR memiliki permasalahan terkait kebiasaan membuang sampah sembarangan baik wisatawan maupun warga. Paska Program Dewi Sumba berakhir, warga kini telah memiliki kebiasaan menjaga lingkungan wisata desa. Warga KAR juga telah mengagendakan kerja bakti rutin untuk membersihkan dan menata kampung. Mereka biasanya bekerja bakti sesuai menunaikan ibadah gereja di hari Minggu. Selain itu, setiap rumah juga telah menyediakan tempat sampah agar kebersihan terjaga dan ada usaha antar warga untuk saling mengingatkan bila ada yang membuang sampah tidak

pada tempatnya atau ketika ada yang meludah sirih pinang sembarangan. Beberapa warga yang memiliki ternak juga telah mengkandangkan hewan ternak dan peliharaannya, tidak lagi berkeliaran seperti dulu. Penataan Pantai Pero juga berbuah pada kebersihan daerah pantai.



Aktivitas pengelolaan retribusi wisata pantai Pero oleh BUM Desa Ana Konda

Kenyamanan di kedua lokasi, Desa Maliti Bondo Ate di KAR dan Pero Konda, ditambah pula dengan menghadirkan lingkungan yang sejuk. Desa Maliti Bondo Ate di mana KAR berada masih sejuk karena dikelilingi pohon-pohon dan tetap dijaga keberlanjutannya. Sementara, dari program ini, masyarakat Pero Konda telah berinisiatif membangun lopo-lopo atau gazebo berjumlah tiga unit di bibir Pantai Pero yang bisa digunakan sebagai tempat berteduh dan menikmati pemandangan pantai. Sebelumnya, di awal kedatangan IRE, Pantai Pero Konda belum memiliki fasilitas apapun. Terdapat rencana, masyarakat Pero Konda juga akan mengembangkan ekowisata mangrove yang banyak ditemui di daerah pantai, yang selain menambah kesejukan

dan keindahan, juga penting untuk keberlanjutan ekologis. Kenyamanan di kedua lokasi semakin paripurna dengan menawarkan pemandangan yang begitu elok. Untuk menjaga keindahan, tidak terlalu banyak yang dilakukan oleh masyarakat di kedua tempat ini. Upaya tersebut telah menjadi praktik keseharian seperti menjaga kebersihan, merawat obyek-obyek wisata sekaligus kekayaan kultural mereka. Aspek estetis baru yang dihadirkan yakni dengan membangun fasilitas pendukung yang juga sedap dipandang mata—seperti loket bergaya rumah adat Ratenggaro dan lopo di Pantai Pero. Kedua lokasi baik di Pero Konda maupun Maliti Bondo Ate sesungguhnya telah memiliki potensi keindahan khas pesisir dengan pasir putih, karang-karang berbagai bentuk, dan air yang biru kehijauan. Di KAR, aspek estetis juga hadir melalui warisan kearifan lokal berupa rumah-rumah adat.



Musyawarah OPW KAR bersama warga yang mendiskusikan berbagai hal dalam pengelolaan wisata kampung dan pantai.

**Keramahan.** Aktivitas pendampingan dalam program Dewi Sumba yang dilakukan oleh Tim IRE kepada warga dan pengelolaan wisata KAR, juga telah menghasilkan perubahan sikap berupa keramahan. Pertama, warga lokal, terutama anak muda KAR, berani untuk mengambil peran sebagai pemandu wisata bagi wisatawan yang datang. Keberanian ini dipupuk dari adanya pelatihan dan pertemuan organisasi pengelola wisata KAR dengan beberapa pihak, termasuk Himpunan Pramuwisata Indonesia di Sumba Barat Daya yang dilibatkan IRE untuk mendiskusikan aturan umum dan khusus dalam pengelolaan wisata di KAR. Dari diskusi yang dilakukan beberapa kali pada bulan Agustus 2019 ini secara gamblang telah memberikan pemahaman bagi komunitas di KAR, bahwa aktivitas pengelolaan wisata bukan hanya sekedar menawarkan produk kain tenun, kerajinan, ataupun atraksi naik kuda serta venue foto yang indah. Selain destinasi yang indah, produk lokal, keramahan juga membutuhkan pelayanan yang tertata dan terorganisir.

Keramahan, baik di KAR maupun di Pero Konda sudah mulai terbentuk, meskipun masyarakat yang mengambil peran sebagai pemandu wisata lokal masih mempelajari kemampuan pelayanan (*hospitality*). Integrasi masyarakat lokal juga dianggap penting karena merekalah yang sangat memahami sebuah destinasi beradaptasi pada perubahan, sebelum dan sesudah, kemudian bisa menurukannya (Page, 2007).

Puncak dari keramahan menghasilkan sesuatu untuk dikenang. Kenangan akan terwujud ketika ada sensasi rasa senang yang membekas dalam ingatan bagi wisatawan yang telah melakukan perjalanan ke suatu tempat. Bagi Kampung

Adat Ratenggaro yang memiliki fasad dan lanskap kultural yang khas, juga kemampuan mereka mengemas pengalaman wisatawan untuk naik kuda, memakai pakaian adat, dan melihat serta membeli cinderamata karya penduduk lokal, akan memberikan pengalaman berbeda yang membekas. Apalagi jika praktik ini telah terorganisasikan dengan tertib. Selain itu, salah satu aspek kenangan yang mencakup adanya aksi menyajikan makanan dan minuman khas lokal yang bersih, sehat, dan menarik. Hal ini sudah mulai terwujud di Pero Konda. Selain mengandalkan sunset point berupa tulisan “Pantai Pero Konda” yang menjadi objek foto dan swafoto bagi pengunjung, pengelola juga sudah mulai menyiapkan kuliner lokal. Awalnya, kelompok pengajian ibu-ibu dan PKK di Pero Konda sempat merasa ragu dan cemas ketika diajak untuk menjajal menjual produk-produk lokal, termasuk produk kue. Namun, dalam kunjungan terakhir, ibu-ibu telah bergerak mengembangkan usaha katering yang menyajikan khazanah kuliner lokal. Selain itu, telah muncul kuliner-kuliner khas pesisir yang dijual oleh pedagang lokal dan memanfaatkan hasil ikan tangkapan nelayan.

Hal ini dapat dimaknai sebagai perubahan. Menilik awalnya, nelayan dan pedagang hasil laut lebih memilih menjalani pekerjaan mereka sehari-hari ketimbang mengembangkan desa wisata. Hal tersebut sempat membuat Tim IRE mengalami sedikit kesulitan untuk menyelaraskan jadwal forum perencanaan dan pengelolaan wisata dengan jadwal melaut dan berdagang para nelayan dan pedagang tersebut. Namun setelah wisata menggeliat, mulai muncul warung-warung kecil kuliner laut di sepanjang pantai—tanda sebuah perubahan kesediaan warga untuk berjibaku dalam pengelolaan wisata.





## EPILOG

### MENARIK PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Desa wisata, baik sebagai kegiatan ekonomi utama maupun alternatif di desa nampaknya kian tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Data BPS (2018) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1.734 desa wisata dari total 83.931 desa di Indonesia. Bahkan, Kemendesa menargetkan akan ada 10.000 desa wisata pada tahun 2020. Deskripsi statistik tersebut sayangnya belum mampu menunjukkan sejauh mana desa wisata memberikan kemanfaatan baik bagi peningkatan pendapatan asli desa (PADes) maupun kesejahteraan masyarakat desa. Gairah mengembangkan desa wisata yang cukup tinggi ini menjadi kurang bermakna jika tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas desa wisata. Di samping itu, aspek yang justru penting ditekankan adalah sejauh mana keberlanjutan desa wisata tersebut baik secara ekonomis maupun secara ekologis. Desa wisata dan desa secara umum sebenarnya menghadapi

problem kapasitas yang dapat diatasi melalui proses pendampingan baik dalam kerangka pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat/daerah maupun pendampingan oleh masyarakat sipil. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya dalam buku ini, kondisi awal wisata di dua desa (Kampung Adat Ratenggaro dan Desa Pero Konda) menunjukkan masih banyaknya persoalan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi wisata. Persoalan-persoalan tersebut tak hanya berpangkal dari aspek teknis-manajerial, namun juga problem kelembagaan yang memunculkan kesemrawutan dalam tata kelola. Karenanya, alih-alih mengatakan dua komunitas ini sebagai desa wisata yang sudah ‘selesai’, kami memilih untuk mengatakan bahwa KAR dan Desa Pero Konda tengah menuju dari wisata desa menjadi desa wisata.

Bab ini akan menjelaskan tentang pembelajaran yang dapat diperoleh dari upaya pengembangan desa wisata di KAR dan Desa Pero Konda. Tentu saja konteks permasalahan di masing-masing desa akan berbeda, namun akan ada benang merah yang diabstraksikan dari proses pendampingan IRE di dua tempat tersebut. Bagian pembelajaran ini akan dibedakan ke dalam dua aspek, yakni pembelajaran dalam pengembangan desa wisata dan pembelajaran dalam proses pendampingan. Pembelajaran dalam pengembangan desa wisata ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan desa wisata. Sementara aspek kedua lebih menekankan pada kerja-kerja pendampingan seperti apa yang menentukan keberhasilan dan capaian-capaian program.

## **1. Rambu-Rambu untuk Mengembangkan Desa Wisata**

Bagian ini akan menjelaskan rambu-rambu apa saja yang diperlukan dalam mengembangkan desa wisata sehingga keberadaan desa wisata mampu memberikan kesejahteraan bagi warga desa. Setidaknya ada empat aspek yang perlu diperhatikan, antara lain: (1) desa wisata perlu ditopang oleh kebijakan yang responsif untuk mendukung pengelolaan desa wisata, (2) adanya kelembagaan pengelola wisata yang profesional dan dikelola secara partisipatif, (3) bangunan kemitraan multipihak dalam pengelolaan desa wisata, dan (4) adanya warga yang memiliki kesadaran dan rasa kepemilikan terhadap desa wisata.

### **Kebijakan yang Responsif dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata**

Arah dan orientasi kebijakan pemerintah desa sangat menentukan pembangunan desa secara keseluruhan. Secara normatif, pemerintah desa dan masyarakat desa dipandu oleh dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJM Desa dan RKP Desa). Secara jangka panjang, dokumen RPJM Desa memuat rencana pembangunan desa selama kurun waktu enam tahun. Meski tak sepenuhnya menggambarkan arah dan orientasi pemerintah desa dalam pembangunan, namun setidaknya dokumen ini menjadi semacam rencana induk pembangunan desa.

Meski wisata menjadi semakin penting nilainya dalam pembangunan desa, namun masih ada kelangkaan kebijakan pariwisata baik di level desa maupun supra desa (Mcareavey

& Mcdonagh, 2011). Akibatnya, pengembangan desa wisata bisa jadi hanya sekedar mengikuti tren semata, tanpa mempertimbangkan aspek historis, kultural, sosial, dan arah kebijakan desa secara keseluruhan. Permasalahan semacam ini nampak jelas di Kampung Adat Ratenggaro (KAR) sebelum program dijalankan. Pengelolaan wisata berbasis budaya lokal ini masih belum memiliki aturan main yang jelas sehingga berpotensi menyebabkan konflik dalam tata kelolanya. Hal ini berimplikasi pada tidak jelasnya pengelolaan wisata dan minimnya kontribusi sektor wisata terhadap ekonomi masyarakat secara keseluruhan.



Potensi kerajinan tangan di Pero Konda

Advokasi kebijakan terhadap pengelolaan wisata KAR menghasilkan regulasi Perdes yang mengatur tentang kelembagaan desa wisata dan pungutan obyek wisata serta *homestay*. Payung regulasi ini menjadi penting untuk menaungi kelembagaan pengelola wisata. Menurut regulasi ini, Lembaga Adat KAR menjadi organisasi pengelola

wisata yang diharapkan mampu membenahi tata kelola wisata KAR. Sementara itu, pengelolaan wisata di Desa Pero Konda diserahkan kepada lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kebijakan pemerintah desa ini mampu mendorong penataan area wisata dan pembagian kerja dalam pengelolaan wisata. Demikian pula dengan peran kabupaten dalam pengembangan desa wisata yang tak kalah pentingnya. Kehadiran Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi angin segar bagi upaya menciptakan iklim kondusif pengembangan wisata di desa.



Kerajinan kayu dan tanduk yang dibuat oleh warga Ratenggaro

Pemerintah di semua level memainkan peran penting dalam mengatur kegiatan pariwisata desa. Hal ini untuk memastikan adanya kerangka kerja yang mendukung pengembangan destinasi wisata serta mengetahui batasan dan daya dukung lingkungan bagi pengembangan wisata. Pada tingkat kabupaten, regulasi yang lahir juga terbilang komprehensif,

mulai dari regulasi yang mengatur tentang pariwisata secara makro hingga aturan-aturan operasionalnya. Regulasi ini tentu saja penting diketahui dan dipahami oleh pemerintah dan masyarakat lokal sehingga terbangun sinergi antara pemangku kepentingan dengan masyarakat lokal (Bricker & Black, 2015).

### **Kelembagaan yang Menopang Tata Kelola Desa Wisata**

Pengembangan desa wisata tak dapat dilepaskan dari institusi yang mengelolanya. Institusi merupakan seperangkat norma dan perilaku yang dapat bertahan dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan bersama (Uphoff, 1986). Pengelolaan desa wisata ini diletakkan dalam kerangka kelembagaan agar dapat bertahan dari waktu ke waktu. Norma yang dituangkan dalam aturan main dan kerangka institusi ini berperan penting untuk menjaga agar pengelolaan wisata tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekaligus daya dukung lingkungan. Institusi dalam pengembangan wisata desa ini tidak terbatas hanya pada organisasi pengelola saja, seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Institusi lainnya, seperti pemerintahan desa, BUM Desa, kelompok usaha warga, dan masyarakat desa lainnya memiliki peran yang strategis dalam memastikan bekerjanya tata kelola desa wisata yang berkelanjutan.

Setidaknya terdapat dua pembelajaran yang dapat diambil dari pendampingan di dua entitas wisata. *Pertama*, pendampingan di KAR dan Desa Pero Konda menunjukkan arti penting partisipasi masyarakat lokal dalam memperkuat kelembagaan desa wisata. Partisipasi komunitas dapat

memberikan promosi positif untuk perlindungan lingkungan dan mencegah fenomena memperoleh manfaat jangka pendek dengan mengorbankan manfaat jangka panjang (Wang & Tong, 2012). Selain itu, adanya partisipasi masyarakat juga membantu agar setiap keputusan pemerintah desa terkait kebijakan wisata dapat menjadi kesepakatan bersama seluruh komunitas. *Kedua*, pendampingan di KAR dan Pero Konda memberi pelajaran bahwa institusi sosial yang ada dalam masyarakat perlu diperhitungkan dalam pengelolaan desa wisata. Institusi sosial ini dapat berupa aturan, pranata adat, dan kekayaan budaya masyarakat yang dapat memberi tenaga bagi pengembangan wisata desa.

### **Kemitraan Multipihak untuk Pengembangan Desa Wisata**

Pengembangan desa wisata yang berkelanjutan menunjukkan pentingnya sinergi tujuan di dalam dan di antara masyarakat, individu, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya (McCareavey & McDonagh, 2011). Desa wisata—sekalipun berada di lingkup paling kecil—sangat memiliki keterkaitan kepentingan dengan aktor lain di luar organisasi pengelolanya. Oleh karenanya kemitraan multipihak dalam pengembangan desa wisata sangat diperlukan.

Dalam kerangka pembangunan wisata berkelanjutan, kemitraan multipihak untuk pengembangan desa wisata harus menjamin perlindungan kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan dari eksploitasi terhadap aset alam, budaya, dan daya dukung lingkungan lainnya. Di samping itu, dalam relasi kemitraan yang melibatkan masyarakat, partisipasi menjadi salah satu aspek penting untuk menuju relasi

yang lebih setara. Meski terdapat tantangan serius untuk membangun kesetaraan ini, namun partisipasi masyarakat perlu dibangun dan diidentifikasi. Tipologi partisipasi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini dapat menjadi refleksi kemana partisipasi masyarakat perlu diarahkan.

**Tabel 4.1. Tipologi Partisipasi Masyarakat**

Tipologi	Penjelasan
Partisipasi pasif	Orang berpartisipasi dengan diberitahu apa yang telah diputuskan atau telah terjadi. Informasi yang dibagikan hanya milik profesional eksternal.
Partisipasi melalui konsultasi	Orang berpartisipasi dengan berkonsultasi atau menjawab pertanyaan. Proses tidak mengakui bagian apa pun dalam pengambilan keputusan, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengambil pandangan dari masyarakat.
Partisipasi yang terbeli	Orang-orang berpartisipasi dengan imbalan makanan, uang tunai, atau insentif materi lainnya. Penduduk lokal tidak memiliki kepentingan dalam memperpanjang teknologi atau praktik ketika insentif berakhir
Partisipasi fungsional	Partisipasi dilihat oleh lembaga eksternal sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka, terutama mengurangi biaya. Orang berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan.

Partisipasi interaktif	Orang-orang berpartisipasi dalam menganalisis secara bersama, pengembangan rencana aksi dan pembentukan atau penguatan kelompok atau lembaga lokal. Metodologi pembelajaran digunakan untuk mencari berbagai perspektif dan kelompok menentukan bagaimana sumber daya yang tersedia digunakan.
Mobilisasi mandiri dan keterhubungan	Orang berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara independen dari lembaga eksternal untuk mengubah sistem. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga eksternal untuk sumber daya dan saran teknis yang mereka butuhkan, tetapi tetap memegang kendali atas penggunaan sumber daya.

Sumber: Pretty (1995) dikutip dari (Mowforth & Munt, 2016)

Partisipasi masyarakat dalam kemitraan semestinya bukan sekadar partisipasi pasif, namun setidaknya partisipasi yang interaktif dimana anggota kemitraan melakukan perencanaan secara bersama dan saling mendorong penguatan kelompok atau lembaga lokal yang ada dalam pengembangan wisata. Tantangan dalam mendorong partisipasi ini adalah bagaimana agar masyarakat mampu menciptakan ruang baru bagi komunitas dan organisasi untuk berpartisipasi bersama (Eversole, 2010). Kedudukan masyarakat lokal dalam kemitraan ini sejatinya setara dengan aktor-aktor lain baik pemerintah maupun pelaku wisata tingkat kabupaten.

Secara umum, kami dapat mengatakan bahwa partisipasi yang hadir selama proses pendampingan adalah proses perubahan

dari partisipasi fungsional menjadi partisipasi interaktif. Adakalanya masyarakat memandang keterlibatan mereka dalam kegiatan pengembangan wisata sebatas untuk mencapai tujuan jangka pendek, yakni peningkatan pendapatan dari kegiatan wisata. Namun demikian, metode-metode yang memungkinkan masyarakat merumuskan rencana aksinya, membentuk lembaga lokal, dan memanfaatkan sumber daya mereka sendiri juga ditempuh selama pelaksanaan program. Hasilnya adalah munculnya kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam merumuskan rencana pengembangan wisata. Idealnya, partisipasi masyarakat dalam kemitraan adalah mobilisasi mandiri dan keterhubungan (*connectedness*) yang memungkinkan mereka mampu mengambil inisiatif, bekerja sama dengan pihak lain, namun mampu memegang kontrol atas penggunaan sumber daya.

### **Kesadaran Pariwisata yang Terbangun dalam Masyarakat**

Wisata mungkin dikaitkan dengan cara hidup komunitas dan perasaan memiliki terhadap suatu tempat (*sense of place*). Sama halnya dengan desa wisata. Cara hidup dan budaya masyarakat desa menjadi suatu yang berharga sekaligus menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk mempelajari adat istiadat setempat atau menikmati warisan budaya leluhur. Karenanya wisata dapat mendorong masyarakat setempat untuk memelihara dan meningkatkan fasilitas serta layanan yang menunjang wisata. Tanpa adanya wisata, beberapa komunitas mungkin tidak termotivasi untuk meningkatkan dan memelihara jalan, fasilitas sanitasi, dan keramahan yang diperlukan untuk menarik wisatawan. Pariwisata

kemudian dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat karena mereka mengenali kekhasan dan potensi yang mereka miliki (Bricker & Black, 2015).

Belajar dari proses pendampingan di dua komunitas (KAR dan Desa Pero Konda), pengembangan desa wisata yang dirintis telah meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap aset dan potensi wisata yang dimilikinya. Rasa kepemilikan ini kemudian mendorong warga untuk memelihara lingkungan sekitar agar tetap bersih dan kondusif bagi para wisatawan. Hal-hal kecil mulai dipikirkan oleh masyarakat KAR, seperti pengadaan tempat sampah, fasilitas kebersihan (toilet), dan sikap yang lebih ramah kepada wisatawan. Kepedulian masyarakat lokal terhadap pengembangan desa wisata menjadi penting karena sumber daya dan keunikan tradisi serta budaya yang melekat pada masyarakat adalah unsur utama dalam menggerakkan kegiatan desa wisata. Karenanya komunitas lokal ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekologi desa wisata (Dewi et al., 2013).

Namun demikian, kami juga harus terbuka untuk mengatakan bahwa hadirnya wisata di desa juga berpotensi mengancam banyak hal dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari cara 'orang luar' atau wisatawan memperlakukan kehidupan masyarakat lokal sebagai 'obyek budaya' yang unik. Demikian pula dengan pelaku wisata lokal, seperti operator pariwisata yang seringkali menganggap masyarakat lokal sebagai 'liyan' untuk dieksploitasi semata-mata sebagai bisnis (Wearing & Mc Donald, 2002). Pendampingan IRE menginginkan agar masyarakat lokal tidak hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, namun juga memperoleh manfaat atas kehadiran desa wisata sekaligus

merasa ‘berdaulat’ atas aset dan potensi yang dimiliki. Lebih jauh, hadirnya wisata harus dilihat sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan komunitas dan bagian dari upaya melestarikan lingkungan dan alam sekitar sebagaimana ditekankan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.



Tarian adat penyambutan pada saat kedatangan Bupati, Wakil Bupati, serta muspida Kab. SBD ke Ratenggaro dalam rangka pengukuhan Lembaga Adat Pengelola Wisata pada bulan Maret 2020.

## 2. Membangun Model Pendampingan

Bagian ini akan menjelaskan poin-poin penting tentang kerja-kerja pendampingan seperti apa yang memungkinkan berhasil dan tidaknya program pengembangan desa wisata selama ini. Terdapat sejumlah poin penting yang dapat direfleksikan dari proses pendampingan terhadap masyarakat di dua entitas ini dalam pengembangan desa wisata. **Pertama**, keberhasilan proses pendampingan sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial kultural masyarakat. Hal ini membawa

kita pada keyakinan bahwa pendamping harus memahami dan menyelami cara berpikir masyarakat setempat sesuai dengan konteks sosial kultural yang mereka yakini. Meski demikian, pendamping juga harus mampu melihat secara kritis pergeseran sosial budaya yang terjadi di masyarakat lokal. Hal ini dilakukan agar tidak semata-mata menganggap bahwa masyarakat lokal/adat sebagai komunitas yang mengalami stagnasi dan tidak mampu merespon perubahan yang ada. Padahal, interaksi mereka dengan ekonomi wisata bisa jadi telah mengubah masyarakat lokal menjadi lebih pragmatis, konsumtif, dan individualis seiring dengan proses komodifikasi terhadap budaya dan alam mereka (Crouch, 2006).

**Kedua**, proses pendampingan menarik pembelajaran bahwa hasil kerja-kerja pendampingan tidak selalu dapat dipanen secara instan sesuai dengan visi perubahan yang ditetapkan. Pendampingan di Desa Pero Konda misalnya, memerlukan waktu hingga hampir berakhirnya program untuk mendorong aktivitas jasa usaha wisata Pantai Pero berjalan. Belum lagi, pandemi Covid-19 yang menghantam sektor pariwisata membuat guncangan kehidupan bagi masyarakat di dua desa, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pariwisata. Hingga kini, sektor wisata belum sepenuhnya pulih dan bahkan kembali normal meski adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) telah diterapkan beberapa bulan sebelumnya. Hambatan ini menyebabkan hasil-hasil yang tidak diharapkan dan dapat berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi sesudahnya.

**Ketiga**, pentingnya pendamping untuk memahami hubungan-hubungan antarinstansi dan kelas-kelas sosial yang ada

di masyarakat. Hal ini sangat menentukan kemana arah/dorongan intervensi penguatan terhadap institusi/individu untuk mencapai perubahan yang diinginkan secara bersama. Selain itu, pemahaman tentang hubungan-hubungan sosial ini juga akan menentukan ketepatan identifikasi kita terhadap aktor-aktor perubahan dalam pencapaian program. Aspek yang tidak kalah pentingnya adalah agar pendamping dapat secara kritis memproyeksikan apakah perubahan yang diinginkan lebih menguntungkan kepada elit-elit lokal pemegang kekuasaan atau kepada masyarakat yang rentan dan marjinal. Kecenderungan elitisme ini juga berpotensi untuk terjadi dalam konteks pengembangan desa wisata sehingga seorang pendamping semestinya mampu mengidentifikasi sejak awal potensi semacam ini.

Model pendampingan dalam arena apa pun, terutama pengembangan desa wisata semestinya menempatkan pendamping lebih sebagai fasilitator sekaligus sumber informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dimodifikasi menjadi pengetahuan oleh masyarakat sendiri (Wearing & Mc Donald, 2002). Pendamping harus mampu memfasilitasi proses pertautan (*engagement*) kritis antara pemerintahan desa, masyarakat lokal, dan aktor-aktor supra desa dalam konteks pengembangan desa wisata yang berpihak pada masyarakat dan berbasis aset serta potensi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annie E. Casey Foundation. 2004. Theory of Change: A Practical Tool For Action, Results and Learning. Organizational Research Service.
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R.H., Wardhana, I.W., Setiawan, H., Damayanty, S.A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A.H., Ariutama, G.A., Djunedi, P., Rahman, A.B. dan Handoko, R. 2020. Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia, *Journal of Rural Studies*, vol. 79, pp. 382-394.
- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E. dan Sudarwati, L. 2020. Village Community Empowerment Through Village Owned Enterprise Based on Social Capital in North Sumatera”, *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, pp. 1-13 DOI: [10.1080/02185385.2020.1765855](https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855)
- Bapelitbangda. 2020. RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024. Sumba Barat Daya.
- BPS Kabupaten Sumba Barat Daya. 2018. Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Angka 2017. Sumba Barat Daya.
- BPS Kabupaten Sumba Barat Daya. 2019. Kabupaten Sum-

- ba Barat Daya dalam Angka 2018. Sumba Barat Daya.
- BPS Kabupaten Sumba Barat Daya. 2020. Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Angka 2019. Sumba Barat Daya.
- BPS Sumba Barat Daya. 2018. Statistik Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya 2017. Sumba Barat Daya.
- BPS Kabupaten Sumba Barat Daya. 2019. Statistik Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya 2018. Sumba Barat Daya.
- Bricker, K., & Black, R. 2015. Framework for Understanding Sustainability in The Context of Tourism Operators. In *Reframing Sustainable Tourism*. [https://doi.org/10.1007/978-94-017-7209-9\\_6](https://doi.org/10.1007/978-94-017-7209-9_6)
- Casswell M.m Mashamaite K., Matshidisho, L. 2014. Local Economic Development: Linking Theory and Practice in South Africa's Local Municipalities, *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5 (20). Di akses melalui [https://www.researchgate.net/publication/269954571\\_Local\\_Economic\\_Development\\_Linking\\_Theory\\_and\\_Practice\\_in\\_South\\_Africa's\\_Local\\_Municipalities](https://www.researchgate.net/publication/269954571_Local_Economic_Development_Linking_Theory_and_Practice_in_South_Africa's_Local_Municipalities)
- Crouch, D. 2006. Tourism, Consumption and Rurality. In P. Cloke, T. Marsden, & P. Mooney (Eds.), *Handbook of Rural Studies* (pp. 355–364). Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781848608016.n35>
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal*

- Kawistara, 3(2), 130–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Dhewanto, W., Ratnaningtyas, R., Permatasari, A., Anggadwita, G. dan Prasetio, E.A. 2020, Rural Entrepreneurship: Towards Collaborative Participative Models for Economic Sustainability”, Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vol. 8 No. 1, pp. 705-724.
- Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya. 2019. Dokumen Data Kunjungan Wisatawan. Sumba Barat Daya.
- Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2012. Pedoman Kelompok Sadar Wisata. Diakses melalui [https://www.kemendparekraf.go.id/asset\\_admin/assets/uploads/media/old\\_all/1\\_%20Pedoman%20Pokdarwis.pdf](https://www.kemendparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_all/1_%20Pedoman%20Pokdarwis.pdf)
- Eticon. 2020. Upaya Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan. <https://eticon.co.id/konsep-pariwisata-berkelanjutan/>
- Eversole, R. 2010. Remaking Participation : Challenges for Community Development Practice. Community Development Journal, 1–13. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsq033>
- Giampiccoli, A. 2020. A Conceptual Justification and a Strategy to Advance Community Based Tourism Development, European Journal of Tourism Research, Vol. 25, pp. 1-19.
- Handoko, S.V. 2018. Bingkai Konflik Pengelolaan Objek Wisata Gua Pindul, Gunungkidul Yogyakarta. Journal Forum Ilmu Sosial. 45(1): 51-74

- Hudayana, B. 2020. Involution in Small-Scale Lava Tour Enterprises Among People Affected by the Mount Merapi Eruption, Indonesia. *Int. J. Tourism Anthropology*, 8(1): 79-102.
- Institute for Research and Empowerment. 2018. Mengembangkan Perekonomian Desa yang Inklusif. IRE: Yogyakarta.
- IRE. 2018. Laporan Assesmen Kesiapan Tiga Desa untuk Mempromosikan dan Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan di Sumba Barat Daya. Jakarta: William and Lily Foundation.
- IRE. 2018. Usulan Program: Memperkuat Desa dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya Setempat. Yogyakarta: Insititute for Research and Empowerment.
- IRE & WLF. 2019. Memperkuat Desa dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Sumberdaya Alam dan Budaya Setempat. Mid-term Report Periode Desember 2018 – Juni 2019.
- IRE & WLF. 2019. Memperkuat Desa dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Sumberdaya Alam dan Budaya Setempat. Mid-term Report Periode Juli – Desember 2019
- IRE & WLF. 2020. Memperkuat Desa dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Sumberdaya Alam dan Budaya Setempat. Mid-term Report Periode Januari – Juni 2020.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2018. Lapo-

- ran Kinerja Kementerian Pariwisata tahun 2018. Jakarta.
- Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor.5/UM.209/MPPT-89 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona.
- Mansor, N. A., Ibrahim, M., Rusli, S. A., Simpong, D. B., Razak, N. F. A., Samengon, H., dan Othman, N. A. 2019. Empowering Indigenous Communities Through Participation in Tourism. *International Journal of Tourism Anthropology*, 7(3-4): 309-329.
- Mcareavey, R., & Mcdonagh, J. 2011. Sustainable Rural Tourism: Lessons for Rural Development. *Sociologia Ruralis*, 51(2), 175–194. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2010.00529.x>
- Mowforth, M., & Munt, I. 2016. *Tourism and Sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the Third World*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315795348>
- Murti, D. C. W. 2019. Locating Nation in a Village: Fusion of Local and Nation Voices in Penglipuran Bali, Indonesia. *International Journal of Tourism Anthropology*, 7(2): 157-177.
- Pemerintah Desa Pero Konda. 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pero Konda tahun 2016-2022. Sumba Barat Daya.
- Pemunta, N. V., Tanywe, A. C. dan Cumber, R. Y. 2019. Environmental Conservation, Tourism Development and The Dilemma of The Indigenous Pygmy People in Southeast Cameroon. *International Journal of*

- Tourism Anthropology, 7(3-4), 181-217.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 50 Tahun 2020 tentang Partisipasi dan Pemberdayaan Desa Wisata.
- Peraturan Desa Pero Konda No. 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan BUM Desa Ana Konda.
- Peraturan Desa Pero Konda No. 7 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa.
- Peraturan Desa Pero Konda No. 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Wisata Desa.
- Peraturan Desa Maliti Bondo Ate No. 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Desa.
- Peraturan Desa Maliti Bondo Ate No. 6 Tahun 2019 tentang Pendirian BUM Desa.
- Prabowo, H.E. 2014. Developing BUM DESA (Village-Owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul- Indonesia. *World Appl. Sci. J.* 30, 30.
- Purbasari, R.P., Soeling, P.D. dan Wijaya, C.W. 2019. An Entrepreneurial Ecosystems Approach to Encouraging Local Economic Development Through a Village-Owned Enterprises Policy [A Case Study of Indonesian Village-Owned Enterprises (BUM DESA)]”, *Archives of Business Research*, 7(4), pp. 254-264.
- Samsir, A. 2016. Studi Komperatif Model BUM Desa Di Kabupaten Bantaeng Administrare, 3(2): 45-58.
- Saragih, Sebastian, dkk. 2007. Kerangka Penghidupan

- Berkelanjutan “Sustainable Livelihood Framework”. Diakses di [https://www.zef.de/fileadmin/user\\_upload/2390\\_SL-Chapter1.pdf](https://www.zef.de/fileadmin/user_upload/2390_SL-Chapter1.pdf)
- Sidik, Hasan. 2020. Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan Di Desa Langensari Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(1): 21 - 30
- Simpong, D. B., Zahari, M. S. M., Hanafiah, M. H., & Ahmad, R. 2019. Indigenous Peoples and Tourism Business Opportunity: The Influence of Orang Asli's Personality Traits and Sense of Community. *International Journal of Tourism Anthropology*, 7(3-4): 268-283.
- Suartini, S.R.dan Permadi, I. I. 2019. Comparison of Village-Owned Enterprises in Indonesia and Township and Village Enterprises in China”, *JL Pol'y and Globalization*, Vol. 91, pp. 169.
- Suastika, I.N. 2017. Village Enterprises (A Case Study of Rural Enterprise-Based Social Capital at The Purwakerti Village Community), *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 12 (4): 26-29.
- Sularto, B. 1980. *Pustaka Budaya Sumba Jilid I*. Jakarta: Ditjen kebudayaan Departemen P & K Republik Indonesia.
- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 389 Tahun 2020 tentang Penetapan 24 Desa wisata di Sumba Barat Daya.
- Surat Keputusan Kepala Desa Maliti Bondo Ate No. 401

tahun 2020 tentang Penetapan Lembaga Adat KAR sebagai pengelola wisata desa di Ratenggaro.

Steiner, A., dan Atterton, J. 2015. Exploring The Contribution of Rural Enterprises to Local Resilience. *J. Rural Study*. 40: 30–45.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Uphoff, N. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases*. Kumarin Press.

Valchovska, S. dan Watts, G. 2016. Interpreting Community-Based Enterprise: A Case Study from Rural Wales. *Journal of Social Entrepreneurship*, 7(2), 211–235.

Wang, H., & Tong, M. 2012. Community Participation in Environmental Management of Ecotourism. In J. A. Seba (Ed.), *Ecotourism and Sustainable Tourism: New Perspectives and Studies*. Apple Academic Press. <https://doi.org/10.1515/9780824844776-016>

Wearing, S., & Mc Donald, M. 2002. The Development of Community-Based Tourism: Re-Thinking The Relationship between Tour Operators and Development Agents as Intermediaries in Rural and Isolated Area Communities. *Journal of Sustainable Tourism*, 10(3), 191–206. <https://doi.org/10.1080/09669580208667162>

Wysokińska, Z. 2017. Millenium Development Goals/UN and Sustainable Development Goals/UN as Instruments for Realising Sustainable Development Concept in the Global Economy, *Comparative economic research. Central and Eastern Europe*, . 20( 1):101-118.

# Menenun Asa Dewi Sumba

Pertumbuhan sektor pariwisata di Pulau Sumba memberikan dampak meningkatnya arus kunjungan wisatawan di Kabupaten Sumba Barat Daya, apalagi didukung posisi yang strategis sebagai salah satu pintu masuk ke Sumba melalui transportasi udara dan laut. Apalagi sejumlah destinasi wisata berbasis alam dan adat budaya di Sumba Barat Daya sudah sangat populer hingga manca negara. Namun potensi yang sangat besar ini masih menyimpan kerentanan dan tantangan yang harus diatasi, khususnya pelibatan dan pemberdayaan warga lokal agar tidak sekedar menjadi penonton pada aktivitas wisata yang ada di depan mata mereka.

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pengalangan IRE Yogyakarta dalam mengelola program “Memperkuat Desa dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya Setempat” dengan dukungan dari Yayasan William dan Lily (WLF). IRE melakukan advokasi kebijakan di tingkat desa dan kabupaten agar tercipta *enabling environment* bagi pengembangan wisata desa di Sumba Barat Daya. Selain itu IRE juga melakukan pendampingan di Kampung Adat Ratenggaro dan Desa Pero Konda sebagai piloting pengembangan wisata desa berkelanjutan melalui pendekatan *Village Driven Development*.

**Institute for Research and Empowerment (IRE)**

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.9,5  
Dusun Tegalarjo RT01/RW09  
Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman,  
Yogyakarta 55581  
Telepon: 0274-867686  
Email: office@ireyogya.org

ISBN 978-623-91597-7-1



9 786239 159771